



Katalog: 8201005

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS DAGING SAPI INDONESIA TAHUN 2019



PRODUSEN



PASAR



KONSUMEN



MINIMARKET

SWALAYAN



**PEDAGANG
BESAR**



Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Katalog: 8201005

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS DAGING SAPI INDONESIA TAHUN 2019

<https://www.bps.go.id>



PRODUSEN



PASAR



KONSUMEN



MINIMARKET
SWALAYAN



PEDAGANG
BESAR



Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi Indonesia 2019

Trade flow of beef commodity in Indonesia 2019

ISBN : 978-602-438-317-6

No. Publikasi/*Publication Number*: 06130.1906

Katalog/*Catalog*: 8201005

Ukuran Buku/*Book Size*: 16,5 X 24 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: xiv + 86 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

Penyunting/*Editor*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

Penerbit/*Published by*:

© BPS RI/*BPS-Statistics Indonesia*

Pencetak/*Printed by*:

CV. NASIONAL INDAH

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all
this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics
Indonesia*

TIM PENYUSUN
DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS
DAGING SAPI INDONESIA 2019

Pengarah :

Yunita Rusanti, M. Stat.

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Elfiza M. E.

Penanggung Jawab Teknis :

Mimin Karmiati, M. Si.

Editor :

Mimin Karmiati, M. Si.

Roy Suerlianto, S.ST, S.AP., M. S.E.

Restu Rahmat Sood, S.ST.

Penulis & Pengolah Data :

Restu Rahmat Sood, S.ST.

Nurlatifah Khoirun Nissa, S.Tr.Stat.

Desain/Layout :

Restu Rahmat Sood, S.ST.

Panji Surya Dwi Manggala, S.Tr. Stat.


KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi Indonesia tahun 2019 merupakan salah satu dari 8 (delapan) jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas daging sapi yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan. Setiap pelaku kegiatan perdagangan memperoleh margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) dalam kegiatan perdagangannya sehingga semakin banyaknya pelaku kegiatan perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas daging sapi di 34 provinsi yang meliputi 288 kabupaten/kota.

Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas daging sapi secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan 2 sampai 7 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan daging sapi nasional adalah Produsen – Pedagang Grosir – Pedagang eceran – Konsumen Akhir dengan MPP total dari petani sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 41,04 persen.

kata kunci: daging sapi, pola distribusi, MPP

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Umum.....	1
1.3 Tujuan Survei	3
1.4 Cakupan Wilayah.....	3
BAB II	5
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2 Kerangka Sampel.....	6
2.3 Alokasi Sampel Per Komoditas Menurut Kabupaten/Kota	6
2.4 Metode Pemilihan Sampel.....	7
2.5 Metode Pengumpulan Data.....	7
2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) ..	7
2.7 Konsep dan Definisi	8
2.8 Penjelasan Grafik Pola Distribusi	10
BAB III	13
3.1 Gambaran Umum.....	13
3.2 Indonesia	15
3.3 Provinsi Aceh.....	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	24
3.5 Provinsi Sumatera Barat	25
3.6 Provinsi Riau	27
3.7 Provinsi Jambi	28
3.8 Provinsi Sumatera Selatan	30
3.9 Provinsi Bengkulu	31
3.10 Provinsi Lampung	33

3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34
3.12	Provinsi Kepulauan Riau	36
3.13	Provinsi DKI Jakarta	37
3.14	Provinsi Jawa Barat.....	40
3.15	Provinsi Jawa Tengah.....	42
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta	44
3.17	Provinsi Jawa Timur	45
3.18	Provinsi Banten.....	47
3.19	Provinsi Bali.....	49
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat	50
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	52
3.22	Provinsi Kalimantan Barat.....	53
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah.....	55
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan	56
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	58
3.26	Provinsi Kalimantan Utara.....	59
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	61
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	62
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan	64
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	65
3.31	Provinsi Gorontalo.....	67
3.32	Provinsi Sulawesi Barat	69
3.33	Provinsi Maluku	70
3.34	Provinsi Maluku Utara	72
3.35	Provinsi Papua Barat	73
3.36	Provinsi Papua.....	75
BAB IV	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sentra Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2018	13
Gambar 2.	Peta Sebaran Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2018 (Ton)	14
Gambar 3.	Impor Daging Segar dan Beku Jenis Lembu Menurut Negara Asal 2018 (Ton)	14
Gambar 4.	Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia (persen)	16
Gambar 5.	Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia menurut Status Badan Usaha (persen)	17
Gambar 6.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi Indonesia	18
Gambar 7.	Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total Daging Sapi Tingkat Provinsi (persen)	21
Gambar 8.	Persentase MPP Total Daging Sapi Tingkat Nasional Data Tahun 2018 dan 2017 (persen)	22
Gambar 9.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Aceh	23
Gambar 10.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara	24
Gambar 11.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Barat.....	26
Gambar 12.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Riau	27
Gambar 13.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jambi	29
Gambar 14.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Selatan	30
Gambar 15.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bengkulu	32
Gambar 16.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Lampung	33
Gambar 17.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	35
Gambar 18.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Riau	36
Gambar 19.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi DKI Jakarta	39
Gambar 20.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Barat	41
Gambar 21.	Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Tengah	43

Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta	44
Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Timur .	46
Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Banten	48
Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bali	49
Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTB	51
Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTT	52
Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Barat	54
Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah	55
Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Selatan	57
Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Timur.....	59
Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Utara	60
Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Utara	61
Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah	63
Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan	65
Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara	66
Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Gorontalo	68
Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Barat	69
Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku	71
Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku Utara	72
Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua Barat	74
Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Daging Sapi	5
Tabel 2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Pola Utama Distribusi Perdagangan Komoditas Daging Sapi di Indonesia Tahun 2016	20

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara produksi dan konsumsi sehingga suatu barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke konsumen. Distribusi perdagangan juga berkaitan erat dengan peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Rantai distribusi yang efisien idealnya akan berpengaruh pada tingkat biaya yang rendah dalam pendistribusian suatu komoditas. Namun, rantai distribusi yang tidak efisien dapat mengakibatkan kenaikan yang cukup tinggi dari harga produsen sampai ke konsumen.

Permasalahan rantai distribusi penting untuk diperhatikan khususnya pada komoditas kebutuhan pokok seperti daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling umum dikonsumsi di Indonesia, meskipun tingkat konsumsi unggas jauh lebih besar. Komoditas ini termasuk dalam daftar 20 bahan pokok penyumbang inflasi terbesar yang selalu dipantau secara intensif oleh pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2014 komoditas ini menyumbangkan andil sekitar 1,46 persen terhadap nilai inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan. Satu tahun berikutnya, andil tersebut naik menjadi 5,10 persen terhadap nilai inflasi kelompok bahan makanan. Kenaikan tersebut disinyalir karena permintaan daging sapi yang tiap tahun kian meningkat.

Dilihat dari ketersediaannya, dalam lima tahun terakhir produksi daging sapi dalam negeri cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017. Akan tetapi, rata-rata pertumbuhan produksinya terbilang relatif stagnan. Berdasarkan studi identifikasi Ketahanan Pangan & Preferensi Konsumen terhadap Konsumsi Daging, diperkirakan bahwa total permintaan daging sapi rumah tangga di Indonesia mencapai 679 ribu ton. Sementara itu, produksi daging sapi pada 2018 diperkirakan sebesar 496 ribu ton. Produksi daging dan konsumsi daging yang tidak seimbang mengakibatkan adanya tambahan suplai daging sapi dengan melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan daging sapi.

Tidak seimbangnya antara suplai dengan kebutuhan komoditas daging sapi diduga akan berpengaruh pada distribusi daging sapi yang tidak merata. Hal ini tercermin dari disparitas dan fluktuasi harga yang masih cukup tinggi antara daerah satu dengan daerah yang lain.

Pemerintah secara garis besar sudah melakukan kebijakan dalam rangka menyederhanakan distribusi daging sapi. pemerintah mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat mengambil alih proses distribusi. Hal ini dimungkinkan oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016 yang mengizinkan Bulog mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi sepanjang telah diamanatkan secara resmi oleh rapat koordinasi antar kementerian di bidang perekonomian.

1.2 Landasan Umum

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut mengenai distribusi perdagangan, pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah komoditas daging sapi. Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan komoditas-komoditas strategis yang lebih baik sebagai salah satu sumber informasi dalam menjawab permasalahan distribusi perdagangan.

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan Survei

Survei Poldis 2019 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir

1.4 Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah Survei Poldis 2019 secara keseluruhan mencakup 354 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 320 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih dengan jumlah sampel 10.288 perusahaan/usaha.

<https://www.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Sapi Tahun 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibu kota provinsi, beberapa kota cakupan Survei Biaya Hidup (SBH) dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan, survei Poldis ini mencakup 354 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 320 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih dengan jumlah sampel sebanyak 10.288 pelaku usaha. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan data kondisi tahun 2018.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Usaha/perusahaan perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pedagang eceran. Untuk produsen daging sapi didekati melalui kegiatan rumah potong hewan (RPH), pengepakan daging bukan unggas, dan pedagang sapi potong hidup. Kegiatan usaha/perusahaan yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Daging Sapi

No	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
1	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
2	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup
3	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan

No	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
4	47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
5	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
6	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditas Hasil Peternakan
7	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
8	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

2.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel Survei Poldis 2019 terbentuk dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2018.
2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

2.3 Alokasi Sampel Per Komoditas Menurut Kabupaten/Kota

Penentuan suatu usaha/perusahaan untuk komoditas tertentu dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditas. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan menurut komoditas sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas tertentu.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

2.4 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 8 komoditas terpilih. Untuk usaha/perusahaan yang bersumber dari SE2016 maupun dari data Survei Poldis 2018, usaha/perusahaan diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar & menengah). Sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari usaha/perusahaan/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk usaha/perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

2.6 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 9,71%; MPP Pedagang Eceran = 14,96%

- c. Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

- i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama
n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP = $\{[(1+9,71\%) \times (1+14,96\%)] - 1\} \times 100\% = 26,12\%$

2.7 Konsep dan Definisi

- a. Usaha/perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan).
- b. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang (Permendag No. 22 Tahun 2016).
- c. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dasar barang, bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).
- d. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan (Buku KBLI BPS 2015).
- e. Perdagangan eceran adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kiosk, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (Buku KBLI 2015).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud distributor, sub distributor, agen, dan pedagang grosir adalah sebagai berikut:

1. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
2. Sub Distributor adalah adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
3. Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Pendapatan agen diperoleh dari komisi penjualan barang.
4. Pedagang Grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
5. Eksportir adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012).
6. Importir adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015).
7. Pedagang Eceran adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang /jasa secara langsung pada konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah Supermarket/Swalayan.
8. Konsumen akhir dalam survei ini antara lain Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan, dan juga Pemerintah dan Lembaga Nirlaba. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel.







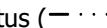
Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

9. Pola distribusi utama adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila pola penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
10. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.
11. Definisi Daging sapi yang diteliti dalam survei ini adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, layak konsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chiled*) atau karkas beku (*frozen*). Tidak termasuk kepala, jeroan, tulang, kulit, gajih/lemak (Ditjennak Kementan).

2.8 Penjelasan Grafik Pola Distribusi

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang merepresentasikan pelaku usaha dan konsumen akhir sebagai berikut:

Ikon	Keterangan
	Produsen Daging Sapi
	Importir Daging Sapi
	Lambang Komoditas

2. Fungsi kelembagaan yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:
 - a. Warna biru langit () mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB).
 - b. Warna merah muda () mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE).
 - c. Warna kuning muda () mewakili fungsi kelompok konsumen akhir.
3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen dan pedagang grosir.
 - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran.
 - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga.
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
 - a. Garis solid 1 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi usaha/perusahaan.
 - b. Garis solid tebal 3 poin (), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola distribusi utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
 - c. Garis putus-putus 1 poin (), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
 - d. Garis putus titik titik putus (), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini

digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.

5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Rincian garis tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Eksportir/Importir diwakili warna ungu (—————→).
 - b. Distributor diwakili warna hijau (—————→).
 - c. Sub Distributor diwakili warna biru (—————→).
 - d. Agen diwakili warna merah (—————→).
 - e. Pedagang Grosir diwakili warna jingga (—————→).
 - f. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (—————→).
 - g. Produsen diwakili warna coklat (—————→).

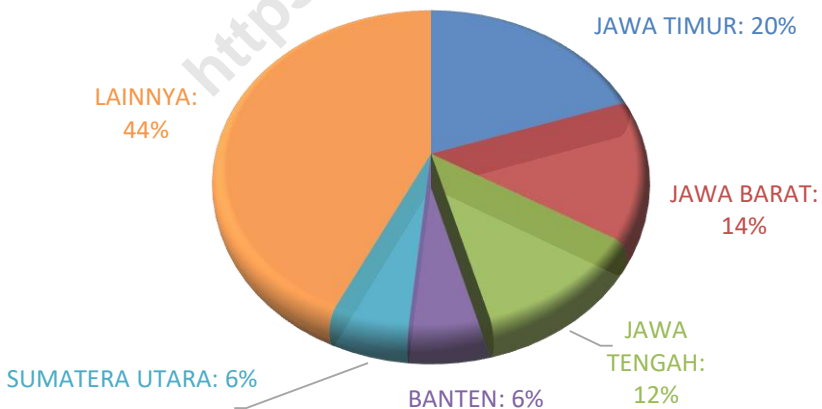
Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (- - - - -→) maupun garis putus titik titik putus (- · · · - - - - -→) tidak disertakan informasi persentasenya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

BAB III ULASAN RINGKAS

3.1 Gambaran Umum

Permintaan daging sapi sebagai sumber protein hewani cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan naiknya konsumsi daging sapi per kapita. Pemenuhan protein hewani dari ayam dan telur sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri, tetapi daging sapi masih perlu impor.

Produksi daging sapi nasional tahun 2018 mencapai 496 ribu ton. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi penghasil daging sapi terbesar di Indonesia dengan share masing-masing sebesar 20 persen, 14 persen, dan 12 persen. DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan turut menyumbang produksi daging sapi sebesar 3 persen. Sementara itu Gorontalo merupakan provinsi dengan produksi daging sapi terendah dengan produksi sebesar 518 ton atau share kurang dari 1 persen.

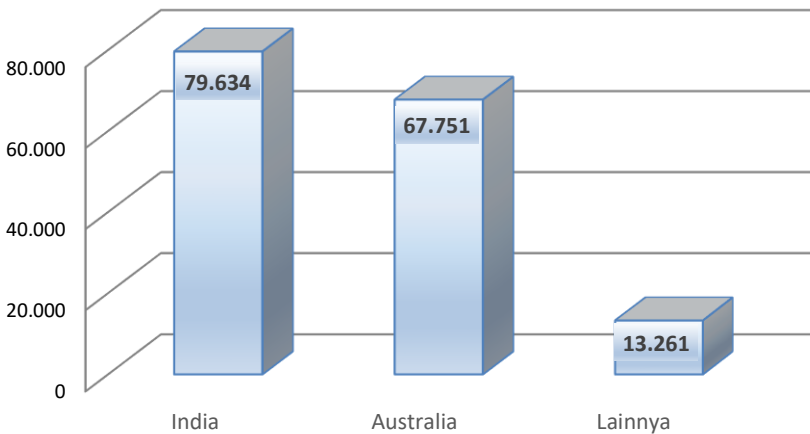


Gambar 1. Sentra Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2018



Gambar 2. Peta Sebaran Produksi Daging Sapi di Indonesia, 2018 (Ton)

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia mengimpor daging segar dan beku jenis lembu, termasuk sapi sekitar 160 ribu ton. Sebesar 49 persen impor tersebut berasal dari India. Negara Australia menjadi importer terbesar kedua, mencapai 42 persen dari total. Negara lain yang turut mengimpor adalah Amerika Serikat dan Selandia Baru dengan share masing-masing sebesar 3 persen, serta Spanyol, Jepang, Kanada, dan Singapura dengan share kurang dari 1 persen.



Gambar 3. Impor Daging Segar dan Beku Jenis Lembu Menurut Negara Asal, 2018 (Ton)

Mengutip dari data Publikasi Pertanian Kementerian Pertanian, perkembangan harga daging sapi di tingkat konsumen sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 cenderung terus meningkat rata-rata sebesar 8 persen per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai Rp. 90.402 per kg dibandingkan tahun 2011 yang hanya Rp. 76.910 per kg atau naik sebesar 20 persen. Namun pada tahun 2018, harga daging sapi menurun cukup tinggi yakni sebesar 20 persen dibandingkan harga tahun 2017. Pada tahun 2017 harga daging sapi mencapai Rp. 115.932 per kg, tahun 2018 harga sapi menjadi hanya Rp. 91.946 per kg. Harga daging sapi yang rata-rata meningkat tersebut ditengarai sebagai akibat dari faktor pendistribusian komoditas dari produsen sampai dengan konsumen akhir yang masih bermasalah.

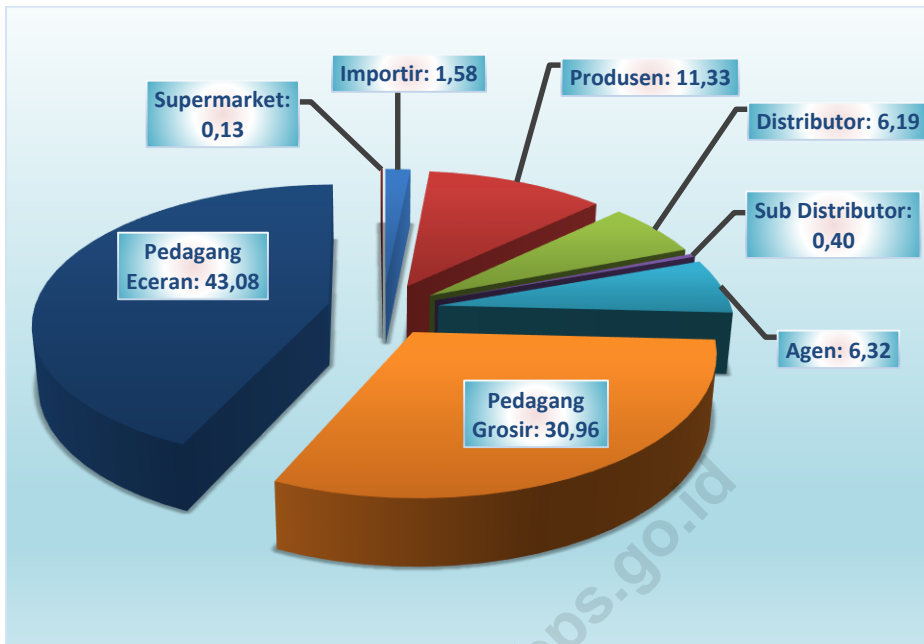
Publikasi ini menggambarkan distribusi daging sapi dan margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen sampai ke konsumen akhir nasional dan di setiap provinsi melalui Survei Pola Distribusi Perdagangan komoditas daging sapi. Ulasan publikasi merupakan hasil survei terhadap 93 produsen, 378 pedagang besar, dan 318 pedagang eceran yang tersebar di 34 provinsi.

3.1.1 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 34 ibu kota provinsi dan 254 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

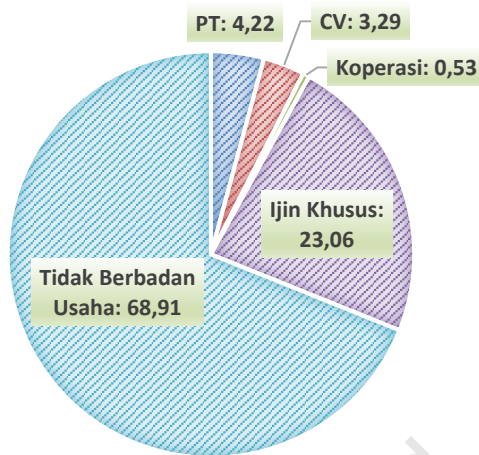
3.1.2 Profil Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi

Menurut Permendag Nomor 20 Tahun 2017, Pelaku Usaha Distribusi dapat didefinisikan sebagai perorangan/badan usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran komoditas yang berkedudukan di dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil Survei Poldis 2018 memberikan gambaran bahwa mayoritas responden termasuk sebagai kelompok pedagang besar, baik sebagai distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir maupun importir. Sementara itu, 22,83 persen responden tercatat sebagai pedagang eceran, sedangkan 16,58 persen sisanya adalah produsen daging sapi.



Gambar 4. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia (persen)

Informasi lain yang dihasilkan adalah status badan usaha menurut jenis pelaku usaha. Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam berwirausaha karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah kepemilikan suatu usaha. Selain itu, legalitas usaha juga dapat digunakan sebagai alat perlindungan hukum dan memudahkan pengusaha dalam hal akses permodalan untuk pengembangan usahanya. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha yang belum berbadan usaha lebih dominan dibandingkan dengan yang sudah berbadan usaha. Masih sekitar 68 persen dari pelaku usaha distribusi komoditas daging sapi belum mengantongi izin usaha seperti PT, CV, Koperasi, dan Izin Khusus. Sementara itu sekitar 23 persen usaha telah memiliki izin khusus, 4 persen berbentuk PT, 3 persen berbentuk CV, dan usaha berbadan usaha koperasi berjumlah kurang dari 1 persen.



Gambar 5. Pelaku Usaha Komoditas Daging Sapi Indonesia menurut Status Badan Usaha (persen)

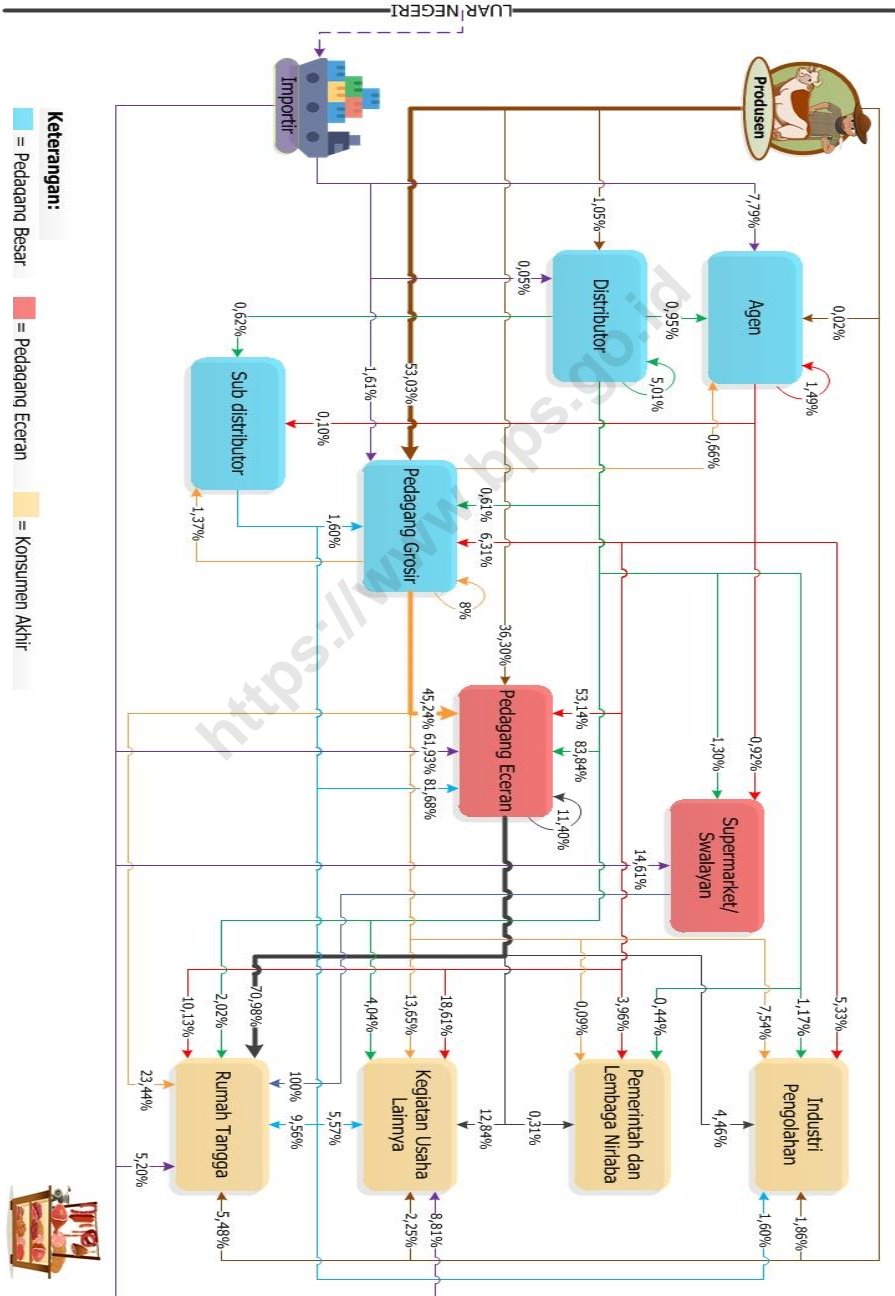
3.1.3 Pola Distribusi Perdagangan

Dalam skala nasional, hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk melibatkan seluruh pelaku usaha mulai dari produsen, pedagang besar, hingga pedagang eceran. Pada level pedagang besar, terlibat juga importir yang turut berperan dalam memasok daging sapi dari luar negeri.

Dari pola distribusi perdagangan yang terbentuk, secara umum tampak beberapa pelaku usaha yang memainkan peran cukup penting dalam pendistribusian daging sapi di lingkup nasional. Seperti yang tertera pada Gambar 6, baik dari distributor, agen, maupun pedagang grosir memiliki jaringan penjualan yang mampu menjangkau ke seluruh fungsi kelembagaan yang terlibat. Setelah menerima pasokan daging sapi dari importir, mayoritas pasokan daging sapi baik dari distributor, agen, maupun pedagang grosir dijual langsung ke pedagang eceran. Namun, penjualan pasokan daging sapi terbanyak yang dilakukan dari importir langsung dijual ke pedagang eceran dengan persentase hampir mencapai 62 persen. Dari jalur produsen, pasokan daging sapi oleh produsen mayoritas dijual ke pedagang grosir sebesar 53,03 persen. Kemudian, dari pedagang grosir didistribusikan ke pedagang eceran sebesar 45,24 persen. Selanjutnya, pedagang eceran menjual daging sapi ke sesama pedagang eceran, industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, kegiatan

usaha lainnya, serta rumah tangga dengan persentase tertinggi dijual ke rumah tangga sebesar 70,98 persen. Lebih lengkapnya mengenai pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi Indonesia



Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi secara nasional terbagi menjadi dua jalur sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Luar Negeri → Importir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang dimulai jalur produsen hingga sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Sedangkan dari luar negeri melalui tiga rantai dengan melibatkan pedagang perantara, yakni importir dan pedagang eceran.

Potensi panjangnya rantai distribusi tersebut saat ini masih menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam upayanya mempertahankan stabilitas harga pangan. Selain menggelar operasi pasar secara rutin, terobosan baru pemerintah dalam memotong mata rantai pendistribusian daging sapi adalah menarik secara langsung pasokan daging dari *feedloter* (penggemukan sapi hidup) ke dalam koperasi-koperasi yang telah disiapkan. Koperasi-koperasi ini nantinya adalah hasil *upgrade* yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok peternak sapi. Ditambah lagi dengan keberadaan kapal ternak yang diyakini mampu menjadi stimulus produsen-produsen daging sapi di wilayah Indonesia Timur seperti Kepulauan Nusa Tenggara dalam mengembangkan populasi sapi potong. Langkah-langkah tersebut akan terus dimonitor dan harapannya dapat diaplikasikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian, harga daging sapi diyakini akan tetap terjangkau oleh masyarakat.

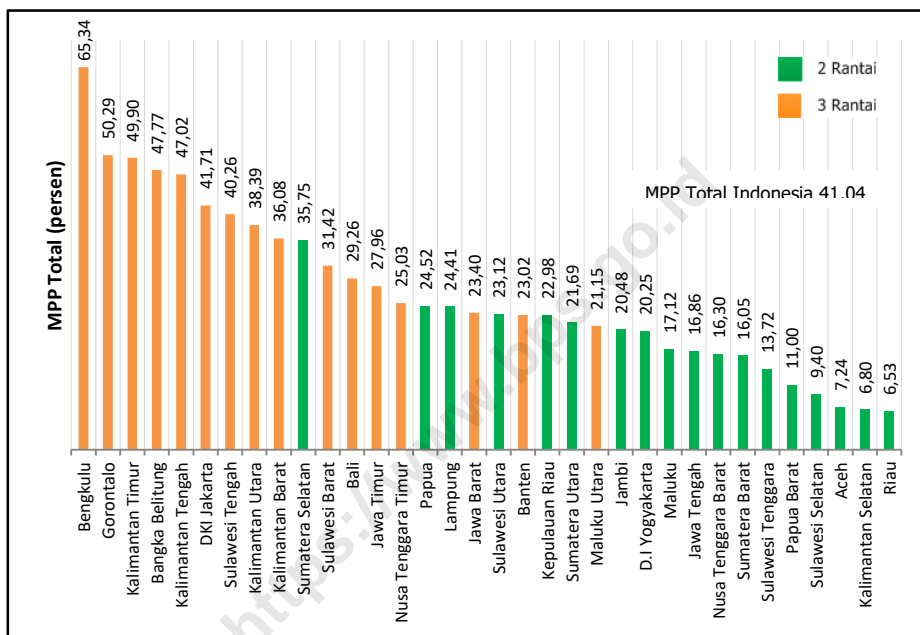
3.1.4 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Selain pola distribusi perdagangan, dari hasil survei diperoleh pula margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total yang dihitung berdasarkan banyaknya rantai dan pelaku usaha yang terlibat pada pola utama distribusi perdagangan. Pola utama distribusi ini didapatkan dari persentase penjualan terbesar dari hulu (penjualan oleh produsen) ke hilir (penjualan oleh pedagang eceran). MPP secara lengkap tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Pola Utama Distribusi Komoditas Daging Sapi Data Tahun 2017

Kode Prov.	Provinsi	MPP Total	Rantai Utama	MPP Pelaku Utama				
				Importir	Distributor	Agen	P.Grosir	P.Ecer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Aceh	7,24	2				7,24	
12	Sumatera Utara	21,69	2					21,69
13	Sumatera Barat	16,05	2					16,05
14	Riau	6,53	2				6,53	
15	Jambi	20,48	3				9,44	10,09
16	Sumatera Selatan	35,75	2					35,75
17	Bengkulu	65,34	3				25,37	31,88
18	Lampung	24,41	2					24,41
19	Kep. Bangka Belitung	47,77	3				30,00	13,67
21	Kepulauan Riau	22,98	3	7,86				14,02
31	DKI Jakarta	41,71	3			13,47		24,89
32	Jawa Barat	23,40	2					23,40
33	Jawa Tengah	16,86	2					16,86
34	D.I Yogyakarta	20,25	2					20,25
35	Jawa Timur	27,96	3				14,30	11,95
36	Banten	23,02	2					23,02
51	Bali	29,26	3		20,04			7,68
52	Nusa Tenggara Barat	16,30	2					16,30
53	Nusa Tenggara Timur	25,03	2					25,03
61	Kalimantan Barat	36,08	3				15,39	17,93
62	Kalimantan Tengah	47,02	3				23,83	18,73
63	Kalimantan Selatan	6,80	2					6,80
64	Kalimantan Timur	49,90	3			21,64		23,23
65	Kalimantan Utara	38,39	3				20,19	15,14
71	Sulawesi Utara	23,12	3				8,36	13,62
72	Sulawesi Tengah	40,26	3				18,60	18,26
73	Sulawesi Selatan	9,40	2					9,40
74	Sulawesi Tenggara	13,72	2					13,72
75	Gorontalo	50,29	3				22,22	22,97
76	Sulawesi Barat	31,42	3				14,27	15,01
81	Maluku	17,12	2					17,12
82	Maluku Utara	21,15	2				21,15	
91	Papua Barat	11,00	2				11,00	
94	Papua	24,52	3			16,67		6,73
99	Indonesia	41,04	3				17,77	19,76

Dari tabel 2, didapatkan MPP total komoditas daging sapi untuk level nasional adalah 41,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen (RPH) hingga ke konsumen akhir di Indonesia sebesar 41,04 persen. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan MPP total daging sapi terbesar yaitu 65,34 persen. Sebaliknya Riau merupakan provinsi dengan MPP total paling kecil yakni sebesar 6,53 persen. Grafik MPP secara lengkap tersaji sebagai berikut:

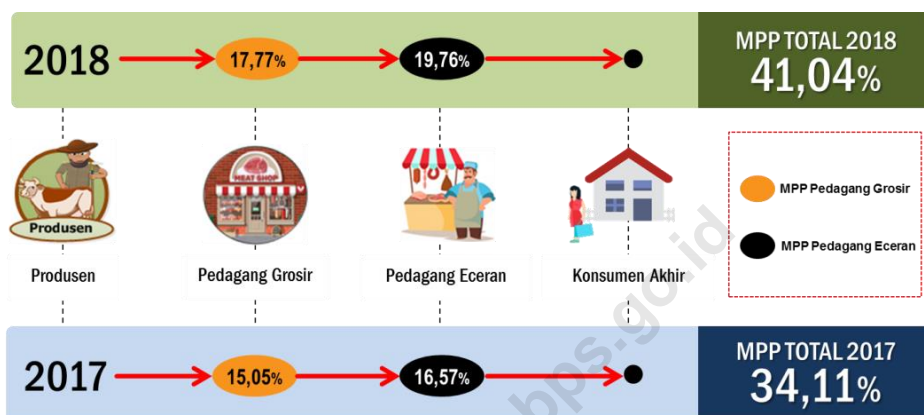


Gambar 7. Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total Daging Sapi Tingkat Provinsi (persen)

Pada Tahun 2019, komoditas daging sapi juga menjadi komoditas terpilih dalam Survei Pola Distribusi Komoditas Strategis (Poldis). Hasil Poldis 2019 untuk data Tahun 2018 menunjukkan bahwa pola utama distribusi daging sapi yang didapat sama dengan data Tahun 2017 (3 rantai), yaitu Produsen – Pedagang Grosir – Pedagang Eceran – Konsumen Akhir. Dengan demikian, MPP total yang diperoleh merupakan MPP dari dua pedagang perantara. Masing-masing sebesar 17,77 persen untuk pedagang grosir dan 19,76 persen untuk pedagang eceran. Sehingga MPP totalnya sebesar 41,04 persen.

Secara umum, jika dibandingkan MPP total data tahun 2018 dengan data tahun 2017 mengalami peningkatan MPP. Peningkatan nilai MPP ini hendaknya

menjadi perhatian bagi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga daging sapi baik pada level produsen, pedagang grosir maupun pedagang eceran agar kebutuhan konsumen dalam pemenuhan konsumsi daging sapi dapat tetap berjalan baik. Perbandingan MPP untuk data tahun 2018 dan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 8 dibawah ini.



Gambar 8. Persentase MPP Total Daging Sapi Tingkat Nasional Data Tahun 2018 dan 2017 (persen)

3.2 Provinsi Aceh

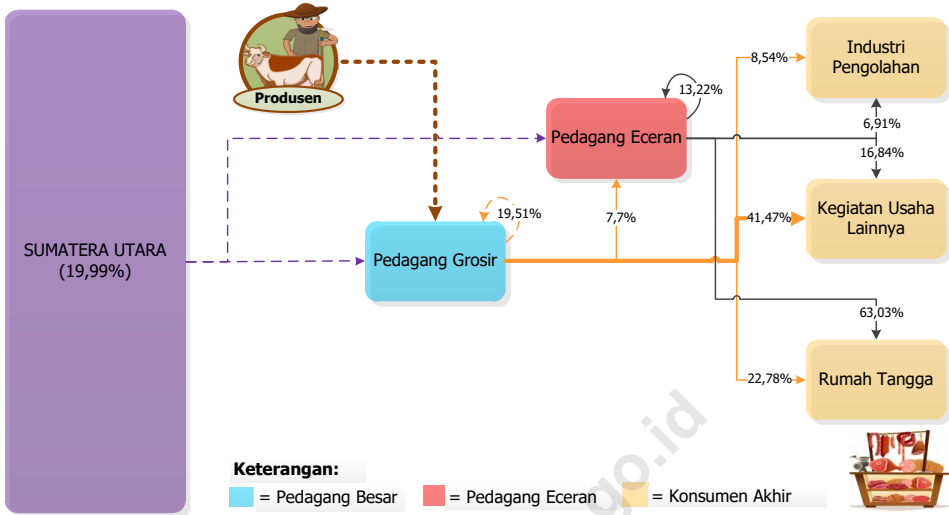
Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

3.2.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi yang terbentuk terlihat cukup sederhana. Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Aceh terdiri dari produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian terbesar dari pedagang grosir berkisar 41 persen adalah ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan daging sapi beserta persentase penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi Aceh selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 9. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Aceh

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Aceh adalah:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Pola utama diambil dari produsen karena dari volume pembelian memiliki jumlah yang lebih tinggi. Pemasokan daging sapi dari luar provinsi berasal dari provinsi Sumatera Utara. Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Aceh dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya, seperti restoran, rumah sakit, hotel, dan lain-lain.

3.2.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

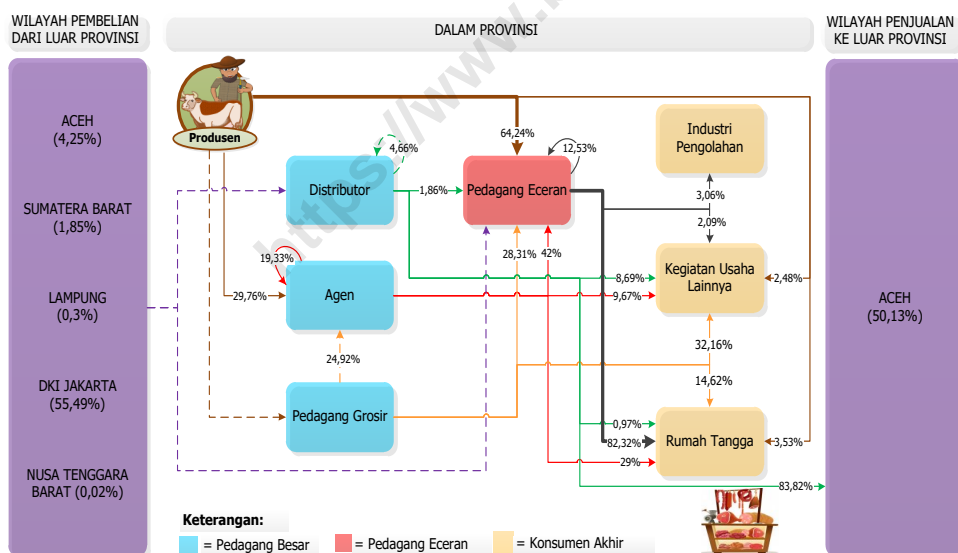
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Aceh adalah sebesar 7,24 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 7,24 persen.

3.3 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, dan Kota Binjai.

3.3.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari produsen, distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian terbesar dari produsen, yaitu sebesar 64,24 persen adalah ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian mendistribusikannya ke konsumen akhir sebesar 82,32 persen. Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Utara selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Sumatera Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.3.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 21,69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 21,69 persen.

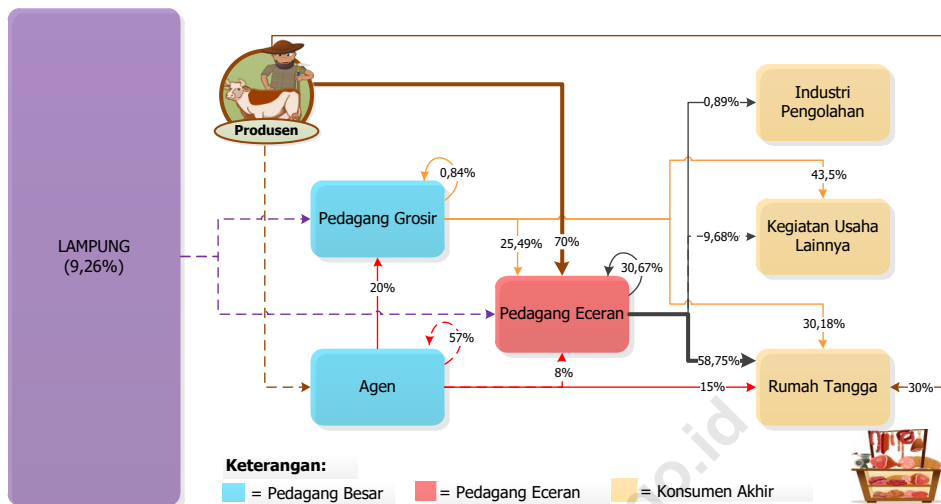
3.4 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

3.4.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari produsen, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen mendistribusikan daging sapi ke pedagang eceran dan langsung ke rumah tangga dengan pendistribusian terbesar, yakni sekitar 70 persen, adalah ke pedagang eceran. Adapun pendistribusian terbesar dari pedagang besar grosir adalah langsung ke konsumen akhir. Untuk memenuhi permintaan, pedagang grosir memasok daging sapi dari luar provinsi, yaitu Provinsi Lampung.

Pola distribusi perdagangan daging sapi beserta persentase penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Barat adalah:

Producers → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Sumatera Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.4.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

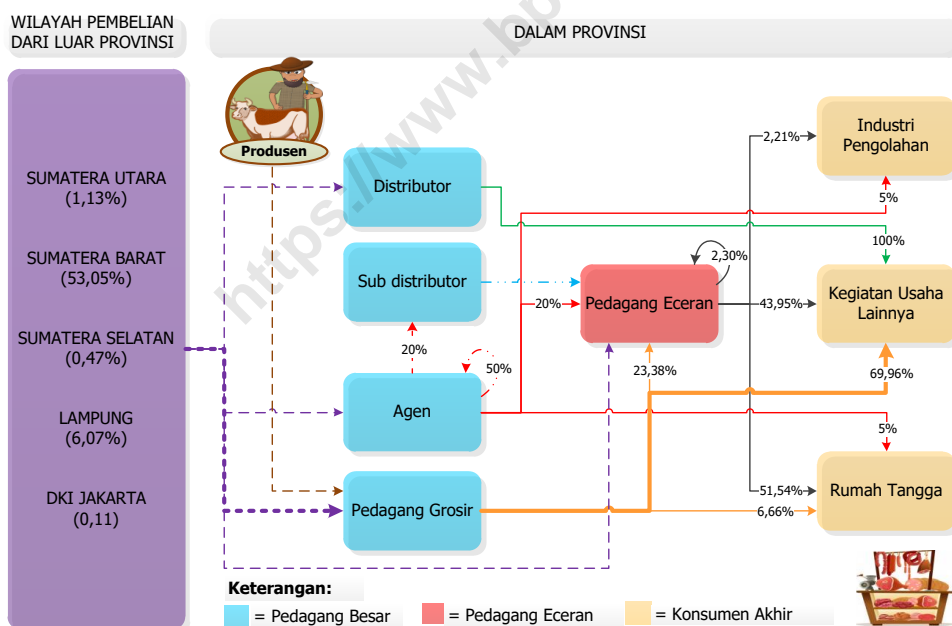
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 16,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 16,05 persen.

3.5 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Pekanbaru.

3.5.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Riau terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Riau hanya melibatkan pedagang grosir hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Riau

Jalur perdagangan pada pola utama berasal dari luar provinsi yang memasarkan stok daging sapi ke pedagang grosir. Hal ini disebabkan karena Provinsi Riau bukan merupakan provinsi sentra produksi daging sapi. Pedagang grosir kemudian menjual mayoritas pasokan daging sapi langsung ke konsumen akhir

yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lain, dan sebagian lainnya dijual ke pedagang eceran. Penjualan terbesar dilakukan oleh pedagang grosir yaitu hampir 70 persen menjual pada kegiatan usaha lainnya. Provinsi Riau yang bukan merupakan daerah sentra produksi daging sapi mendapatkan pemasokan daging sapi berasal dari luar provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan pemberi pasokan terbesar.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.5.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Riau adalah sebesar 6,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 6,53 persen. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan MPP terkecil di Indonesia.

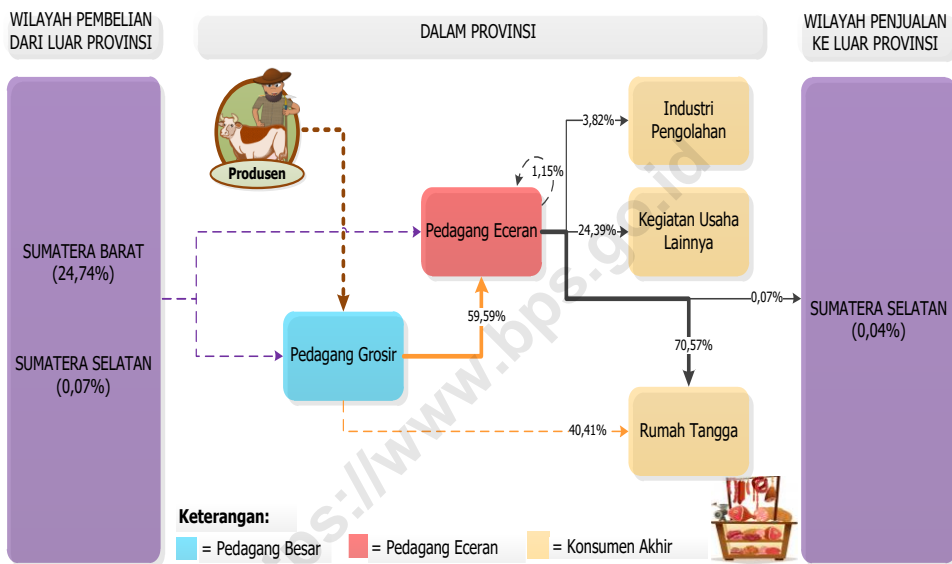
3.6 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

3.6.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi yang terbentuk terlihat cukup sederhana. Para pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi

Jambi hanya melibatkan produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pola utama jalur distribusi berasal dari produsen yang menjual stok daging sapi ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual sebagian besar suplainya ke pedagang eceran dan sisanya ke rumah tangga. Sekitar 70 persen stok daging sapi di pedagang eceran didistribusikan ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 13. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jambi

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Pemasokan daging sapi yang berasal dari luar provinsi didapatkan dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan. Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.6.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

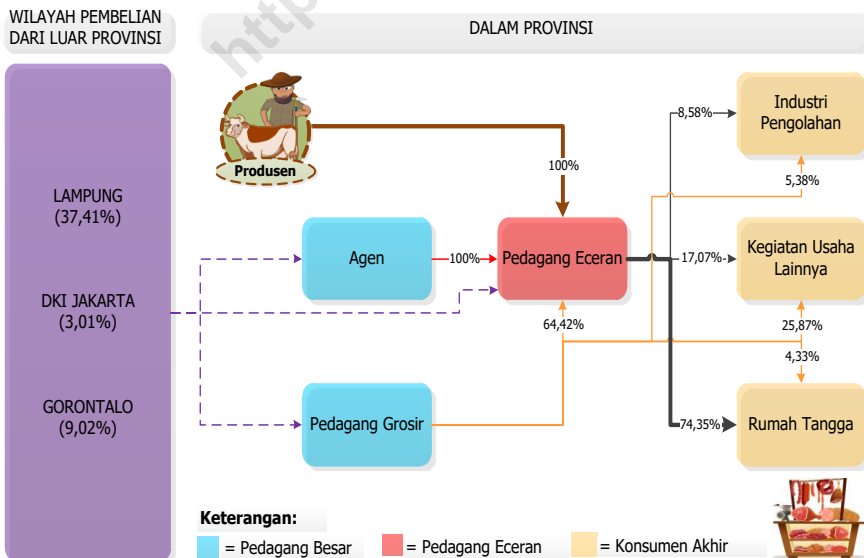
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jambi adalah sebesar 20,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 20,48 persen.

3.7 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau.

3.7.1 Pola Distribusi

Produsen langsung menyuplai sebesar 100 persen ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran meneruskan rantai distribusi tersebut sebesar 74,35 persen ke konsumen akhir, yaitu rumah tangga. Selain produsen, pedagang eceran juga mendapat pasokan daging sapi dari agen, pedagang grosir dan luar provinsi. Secara lengkap pola distribusi Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sumatera Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.7.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

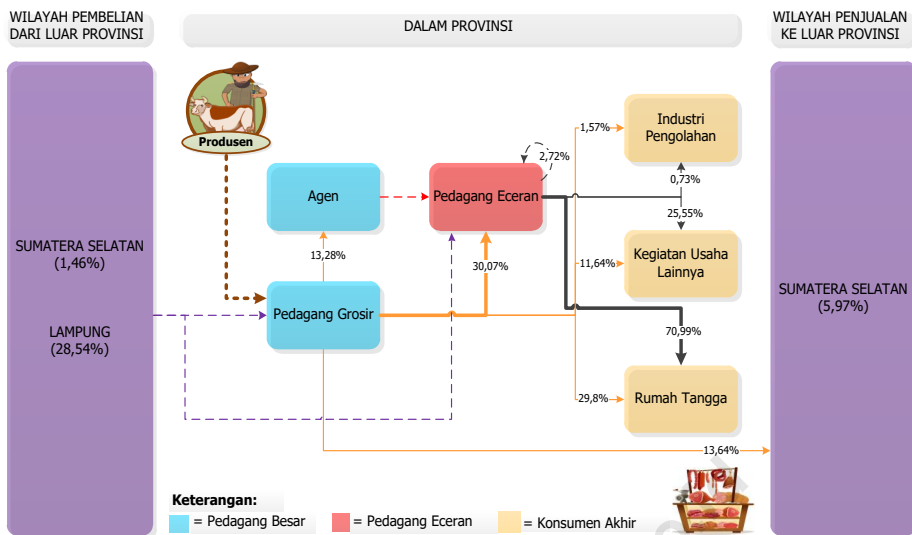
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 35,75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 35,75 persen.

3.8 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.

3.8.1 Pola Distribusi

Jalur utama distribusi berawal dari pedagang grosir yang mendapatkan stok dari produsen meskipun Provinsi Bengkulu bukan merupakan provinsi sentra produksi daging sapi, karena volume pembelian yang didapat diterima lebih banyak berasal dari produsen. Stok daging sapi didapatkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pedagang grosir mendistribusikan stok daging sapi tersebut sebagian besar melalui pedagang eceran sekitar 30 persen. Sisanya didistribusikan ke agen, konsumen akhir dan luar provinsi. Kemudian, pedagang eceran mendistribusikan stok daging sapi langsung ke rumah tangga berkisar 70 persen, dan sisanya didistribusikan ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada gambar 15.



Gambar 15. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bengkulu

Adapun rantai distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:



Jumlah rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.8.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

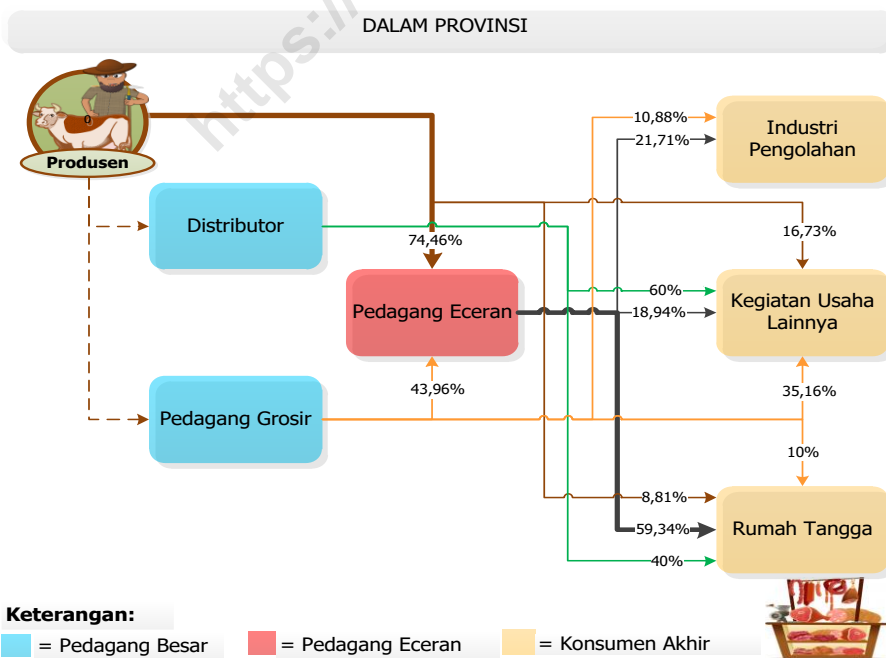
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 65,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 65,34 persen. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nilai MPP yang cukup tinggi lantaran kurang tersedianya sapi lokal yang bisa dipotong untuk selanjutnya dijual. Hal ini memaksa pihak pemotongan hewan maupun toke sapi melakukan impor sapi diluar kawasan Provinsi Bengkulu dengan harga yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kelonjakan harga daging di Bengkulu.

3.9 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

3.9.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Lampung terdiri dari produsen, distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen menentukan jalur utama distribusi perdagangan dengan menyuplai 74,46 persen stok daging sapi langsung ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran menyuplai pasokan daging sapi ke industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga, dengan persentase terbesar ke rumah tangga sebesar 59,34 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Lampung

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian tersebut melibatkan pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.9.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Lampung adalah sebesar 24,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 24,41 persen.

3.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

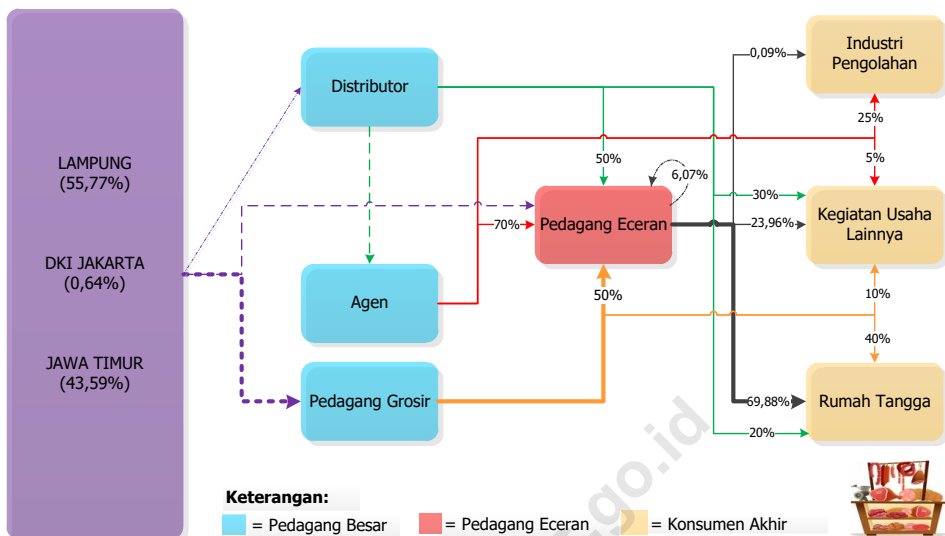
Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang.

3.10.1 Pola Distribusi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pasokan daging sapi 100 persen berasal dari luar provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Pelaku usaha terdiri dari distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari luar provinsi, melanjutkan jalur pemasaran ke pedagang eceran dengan menjual 50 persen pasokannya. Pedagang eceran menjual pasokan daging sapi ke pedagang eceran lainnya, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga dengan persentase distribusi terbesar ke rumah tangga hampir 70 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Bangka Belitung secara lengkap disajikan pada gambar 17.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 17. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.10.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

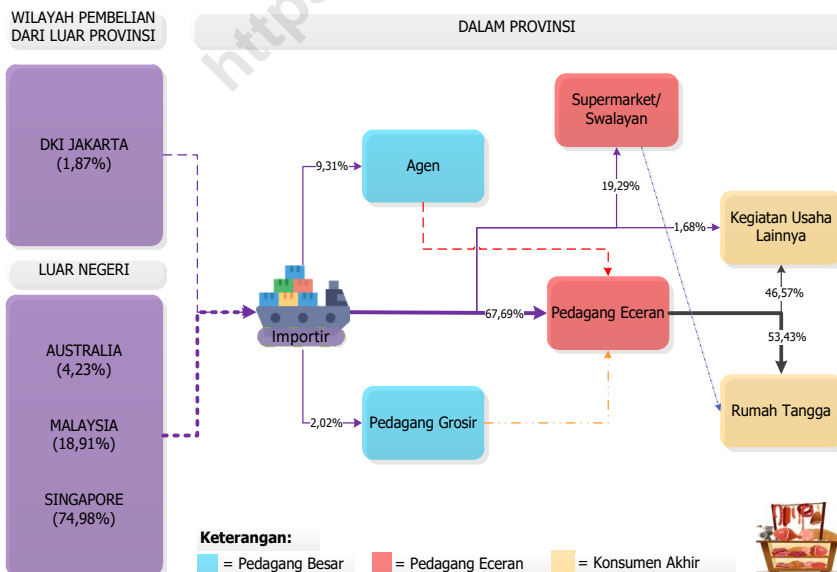
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 47,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 47,77 persen.

3.11 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

3.11.1 Pola Distribusi

Dari hasil pencacahan terhadap beberapa pedagang daging sapi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, didapatkan informasi bahwa pergerakan arus distribusi daging sapi di Kepulauan Riau sangat tergantung pada pihak-pihak importer dan luar provinsi. Oleh karena keadaan geografis yang merupakan wilayah kepulauan serta merupakan pintu gerbang dari negara tetangga, ada indikasi kuat bahwa para pedagang eceran melakukan pengadaan stok daging sapi dari luar negeri melalui importir, agen, dan pedagang grosir. Importir memainkan fungsi yang penting karena memiliki jaringan perdagangan yang cukup luas. Importir menjual sebagian besar stok daging sapi ke pedagang eceran hampir 68 persen. Kemudian pedagang eceran mendistribusikannya ke rumah tangga sekitar 53 persen dan sisanya ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kepulauan Riau

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

Luar Negeri → Importir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk adalah tiga rantai. Negara yang memberikan pasokan daging sapi ke Provinsi Kepulauan Riau adalah Australia, Malaysia, dan Singapore. Persentase terbesar dalam pemasokan daging sapi berasal dari Singapore yang hampir mencapai 75 persen. Dari luar negeri melibatkan importir dan pedagang eceran sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.11.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 22,98 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 22,98 persen.

3.12 Provinsi DKI Jakarta

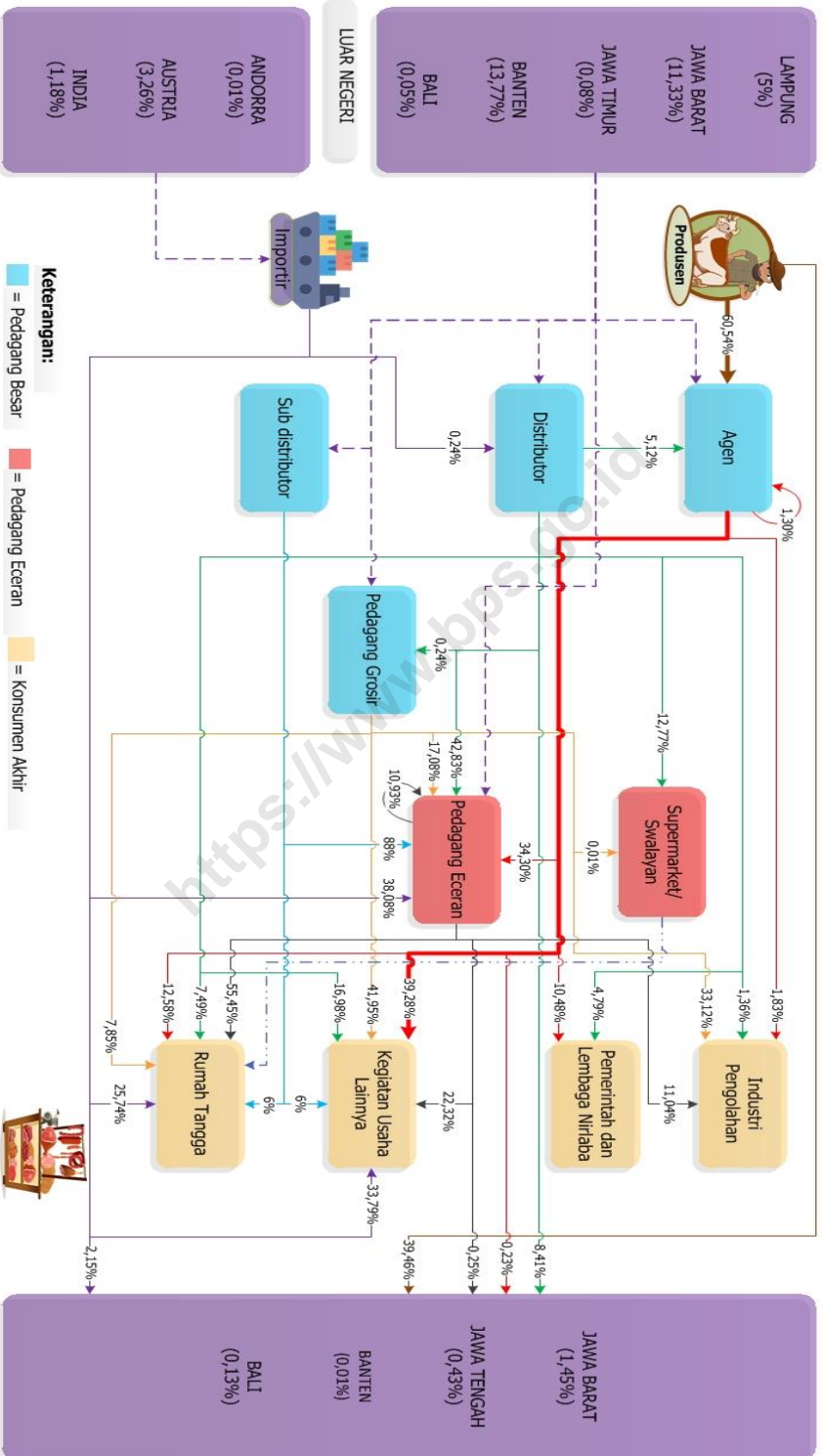
Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi seluruh kota administrasi di DKI Jakarta, yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

3.12.1 Pola Distribusi

Dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan komoditas bahan pokok seperti daging sapi pun sangat besar. Hal ini tercermin dari kompleksnya rantai distribusi perdagangan komoditas tersebut di kota Megapolitan ini. Hasil survei menunjukkan secara umum banyak fungsi kelembagaan pada level pedagang besar yang berperan dalam jalur distribusi daging sapi seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, hingga melibatkan importir. Tampak pada Gambar 19 sebagian besar pasokan daging yang

berasal dari produsen memberikan pasokan dagingnya sekitar 60 persen ke agen. Dari agen, pasokan daging sapi terbesar didistribusikan langsung ke kegiatan usaha lainnya dengan persentase hampir mencapai 40 persen, yang hanya berbeda sekitar 5 persen dengan pendistribusian ke pedagang eceran. Terdapat daging sapi impor yang berasal dari beberapa negara seperti Andorra, Austria, dan India. Jalur importir menguasai pangsa pasar secara global dari pedagang besar, pedagang eceran, hingga sampai ke konsumen akhir. Selain itu, terdapat juga penerimaan pasokan daging sapi yang berasal dari luar provinsi. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

<https://www.bps.go.id>



Gambar 19. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi DKI Jakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Agen → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yaitu agen dengan konsumen akhirnya adalah kegiatan usaha lainnya.

3.12.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 41,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 41,71 persen.

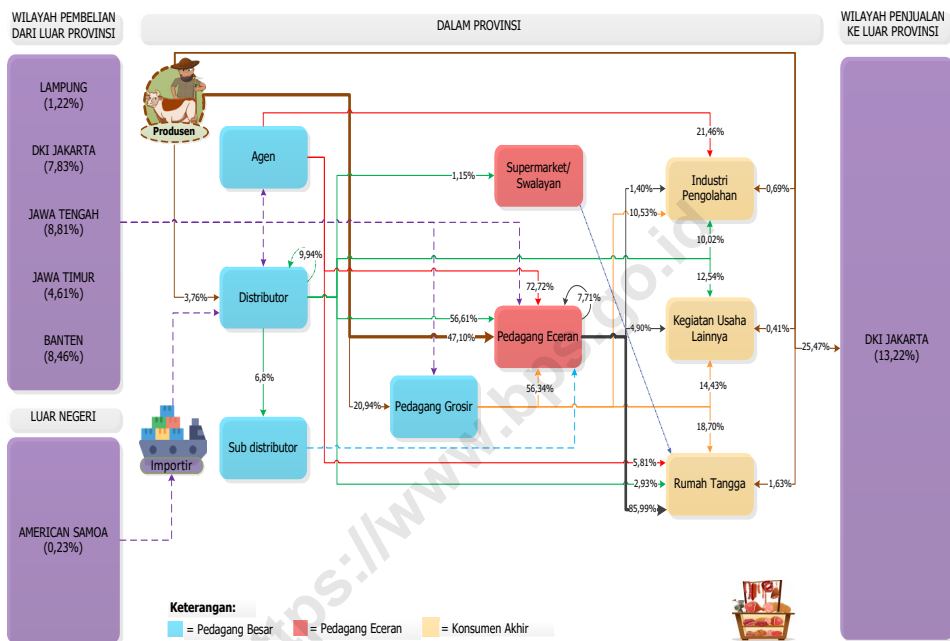
3.13 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

3.13.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Barat melibatkan cukup banyak fungsi usaha seperti distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan juga supermarket/swalayan. Produsen menjual stok daging sapi ke distributor, pedagang grosir, pedagang eceran, maupun langsung ke konsumen akhir, yang mayoritas penjualannya ke pedagang eceran. Selanjutnya,

pedagang eceran sebagai penerima pasokan terbesar dari produsen mendistribusikan stok daging sapi yang di dapat ke konsumen akhir dan sesama pedagang eceran yang mayoritas ke rumah tangga sekitar 86 persen. Terdapat pemasokan daging sapi yang berasal dari luar provinsi dan juga importir dari luar negeri. Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Barat tersaji pada gambar berikut:



Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Barat

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir (rumah tangga) adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran. Namun, pola utama tersebut berpotensi menjadi lebih panjang jika melalui jalur: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

3.13.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

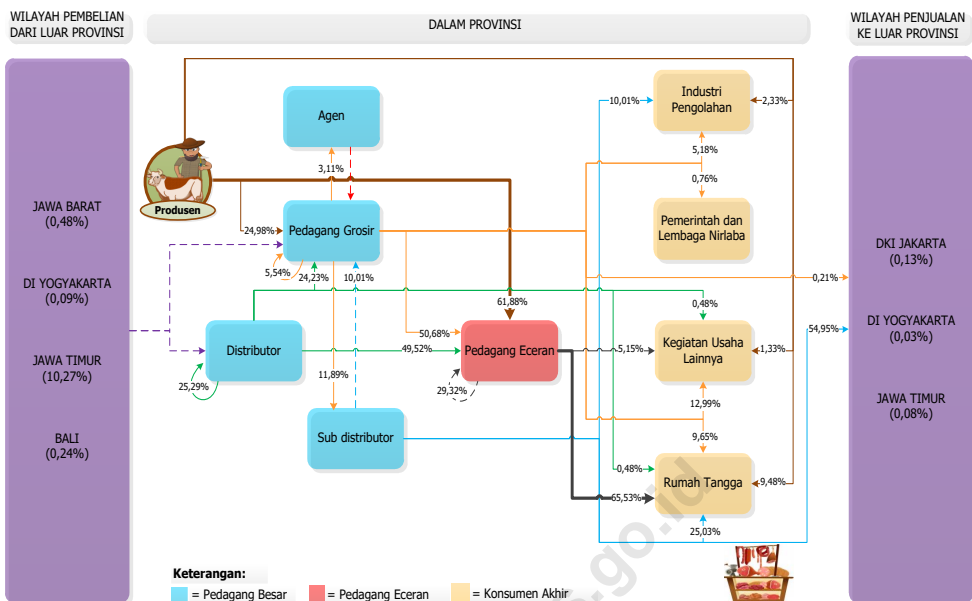
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 23,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 23,40 persen.

3.14 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

3.14.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak melibatkan pelaku usaha, antara lain produsen, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Produsen menjual daging sapi sebagian besar langsung ke pedagang eceran sekitar 62 persen, sisanya ke pedagang grosir dan konsumen akhir. Kemudian, pedagang eceran mendistribusikan daging sapi ke sesama pedagang eceran, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga, dengan pendistribusian terbesar sekitar 65 persen ke rumah tangga. Jalur pendistribusian berpotensi lebih panjang jika melalui pedagang grosir sebelum ke pedagang eceran. Pasokan daging sapi juga didapat dari luar provinsi, seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali. Pola perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Tengah tersaji secara lengkap pada gambar 21.



Gambar 21. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Tengah

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.14.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

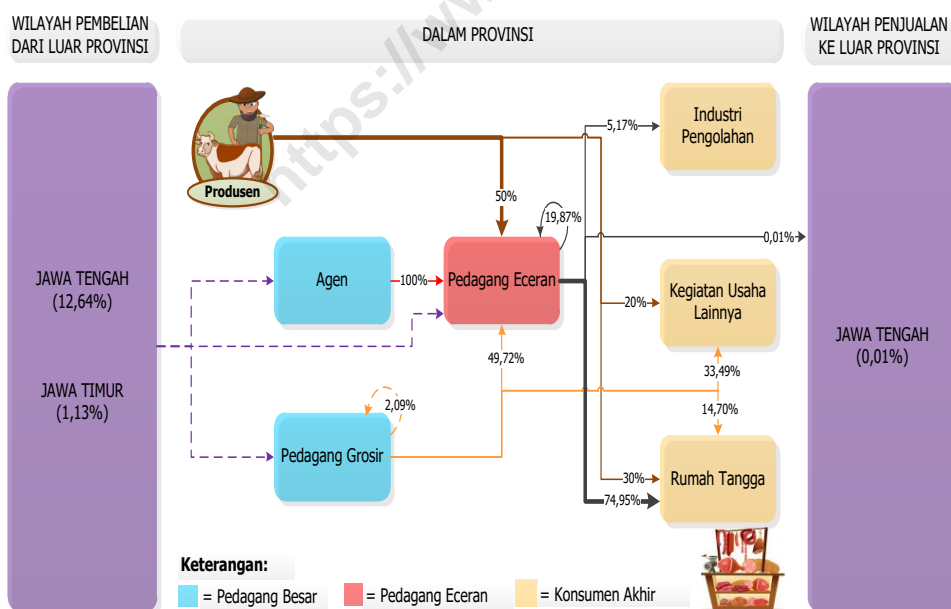
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 16,86 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 16,86 persen.

3.15 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

3.15.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi daging sapi di D.I. Yogyakarta cukup sederhana, yaitu hanya produsen, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Produsen memasok stok daging sapi ke pedagang eceran sebesar 50 persen. Agen dan pedagang grosir menerima pasokan dari luar provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Pasokan daging sapi yang didistribusikan oleh pedagang eceran terbesar disalurkan ke rumah tangga hampir 75 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.15.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 20,25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 20,25 persen.

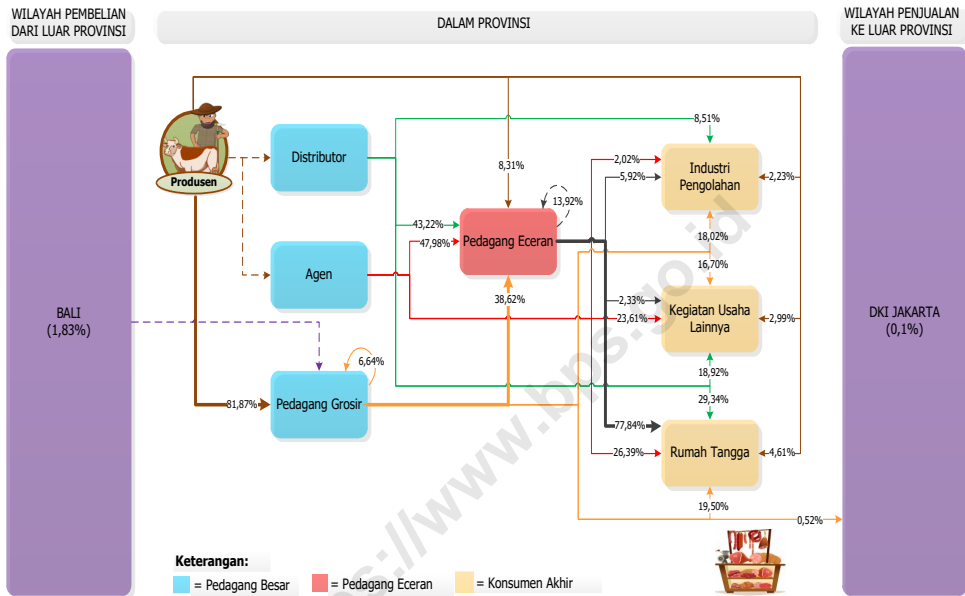
3.16 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

3.16.1 Pola Distribusi

Dari hasil survei, pola distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk memiliki tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Distribusi daging sapi di Provinsi Jawa Timur melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian sebagian besar yang dilakukan oleh produsen didistribusikan ke pedagang grosir sebesar 81,87 persen.

Kemudian, didistribusikan ke pedagang eceran sebesar 38,62 persen. Oleh pedagang eceran didistribusikan ke rumah tangga hampir 78 persen dan sebagian kecil lainnya didistribusikan ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 23. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Jawa Timur

Adapun pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai, dengan melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.16.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

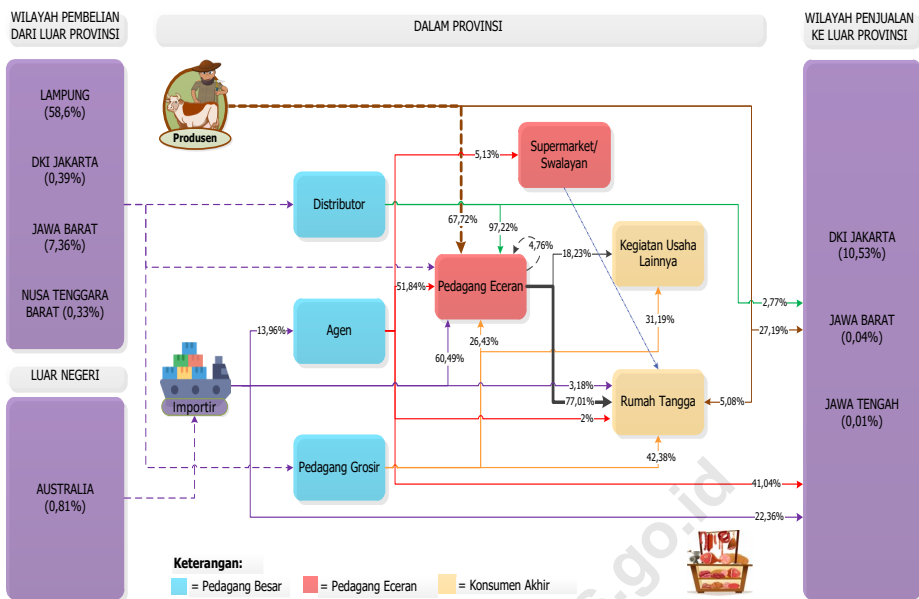
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 27,96 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 27,96 persen.

3.17 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang menjadi wilayah sampel pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

3.17.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan daging sapi di provinsi Banten cukup banyak, seperti importir, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, serta supermarket/swalayan. Jalur distribusi daging sapi di Provinsi Banten terpecah menjadi tiga jalur, yaitu dari produsen, dari provinsi lain, serta impor dari Negara lain. Untuk jalur produsen, produsen mendistribusikan daging sapi ke pedagang eceran, sebelum menjualnya ke konsumen akhir. Kemudian jalur luar provinsi, daging sapi didistribusikan oleh distributor dan pedagang grosir. Sedangkan dari importir, daging sapi dijual melalui agen sebelum dijual ke pedagang eceran, supermarket/swalayan, konsumen akhir, serta luar provinsi. Selain itu, dari importir juga dilakukan pendistribusian daging sapi langsung ke konsumen akhir dan luar provinsi. Jalur utama distribusi daging sapi Provinsi Banten melalui produsen yang kemudian didistribusikan ke pedagang eceran sekitar 68 persen. Dari pedagang eceran, sebagian besar pasokan daging sapi didistribusikan ke rumah tangga sekitar 77 persen, dan sisanya ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar 24.



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Banten

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai, dengan melibatkan satu pedagang perantara, yaitu pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.17.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

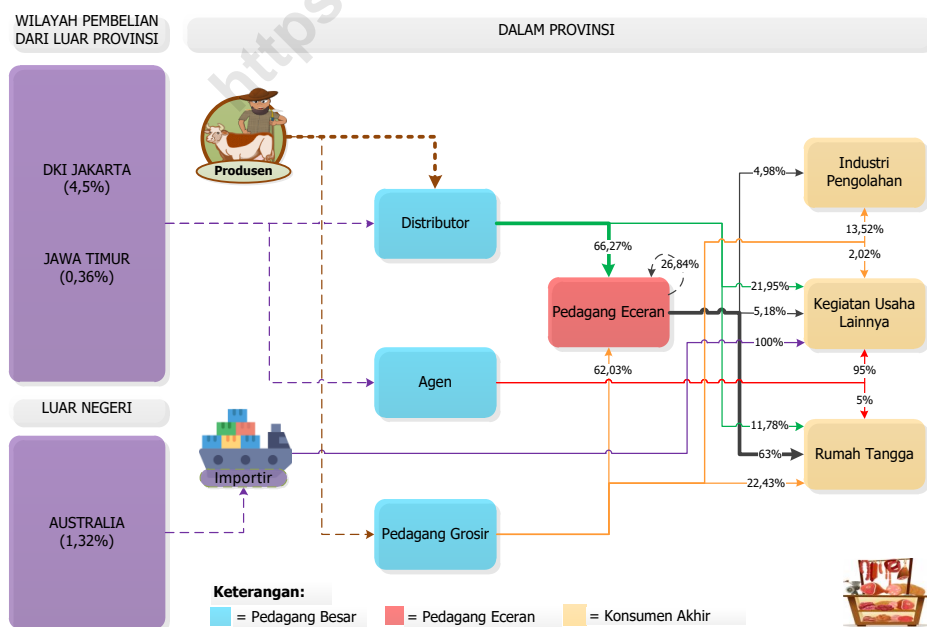
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Banten adalah sebesar 23,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 23,02 persen.

3.18 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

3.18.1 Pola Distribusi

Pelaku usaha distribusi daging sapi di Provinsi Bali melibatkan distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, serta importir. Provinsi Bali mendapatkan pasokan daging sapi dari produsen yang kemudian didistribusikan ke distributor dan pedagang grosir, dari luar provinsi ke distributor dan agen, serta importir dari luar negeri yang berasal dari Australia. Jalur perdagangan oleh distributor sebelum menjangkau konsumen akhir dapat melalui pedagang eceran dengan persentase pendistribusian sebesar 66,27 persen, kemudian oleh pedagang eceran ke konsumen akhir yang terbesar adalah rumah tangga dengan pendistribusian sebesar 63 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada Gambar 25.



Gambar 25. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Bali

Sementara itu, pola utama distribusi komoditas daging sapi di provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Bali yang merupakan provinsi bukan sentra produksi pada pola rantai utama mendapat pasokan daging sapi dari luar provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.18.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Bali adalah sebesar 29,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 29,26 persen.

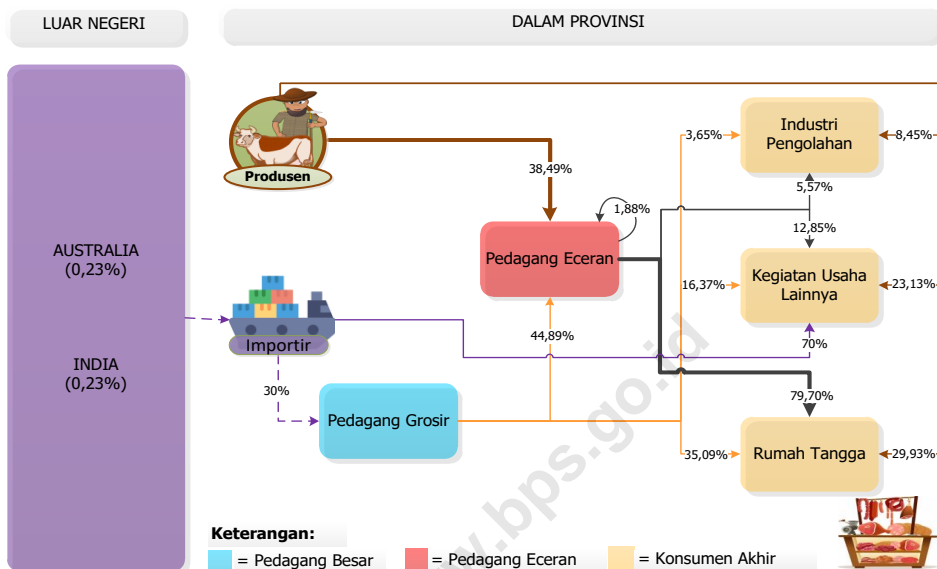
3.19 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3.19.1 Pola Distribusi

Dikenal sebagai salah satu daerah pengembangan populasi sapi potong di Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa rantai distribusi daging sapi di Provinsi NTB terlihat cukup sederhana. Produsen sebagai pelaku usaha di hulu menjual 38,49 persen dari hasil produksi daging sapi ke pedagang eceran. Selain itu, produsen memasarkan sebagian besar pasokannya ke konsumen akhir secara langsung, yaitu industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Dari data pembelian, diperoleh informasi pula bahwa Provinsi NTB mendapatkan suplai daging sapi melalui importir dari luar negeri, yaitu Australia dan India. Kemudian, dari importir didistribusikan ke pedagang grosir dan kegiatan usaha lainnya. Oleh pedagang grosir,

suplai tersebut diperdagangkan ke pedagang eceran serta sebagian yang lain diteruskan ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi NTB secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTB

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi NTB dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran saja. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.19.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

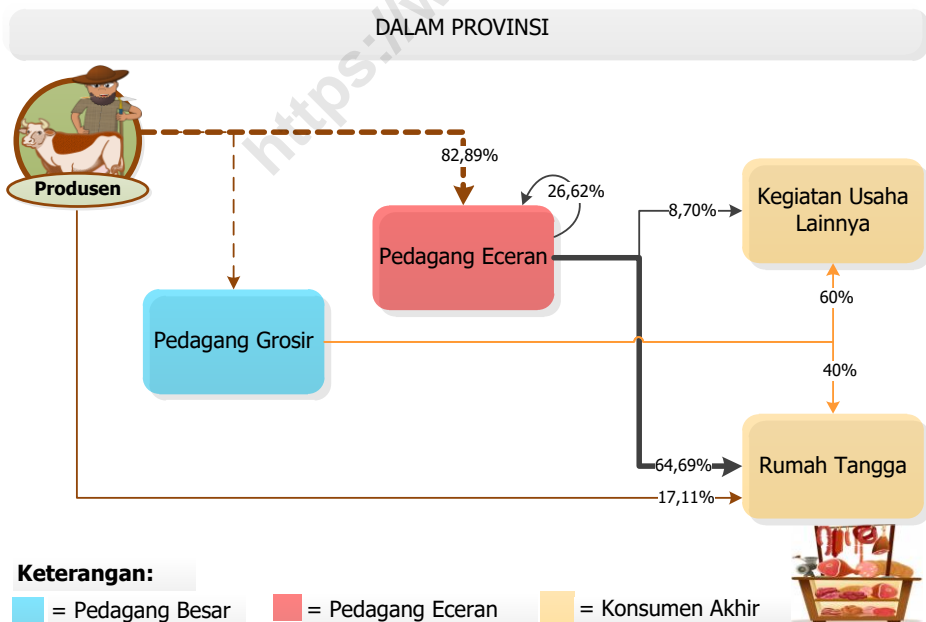
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 16,30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 16,30 persen. Angka ini merupakan yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang.

3.20.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi NTT melibatkan dua lembaga usaha perdagangan yaitu, pedagang grosir dan pedagang eceran. Data survei menggambarkan bahwa penjualan daging sapi dari produsen didistribusikan 82,89 persen ke pedagang eceran. Berdasarkan Gambar 27, dari data pembelian, didapatkan informasi bahwa pedagang grosir menerima pasokan dari produsen. Kemudian, dari pedagang eceran mayoritas menjual daging sapi ke rumah tangga hampir mencapai 65 persen, sedangkan pedagang grosir menjual sebagian besar daging sapi ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi NTT secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 27. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi NTT

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya hanya melibatkan pedagang eceran saja. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.20.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 25,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 25,03 persen.

3.21 Provinsi Kalimantan Barat

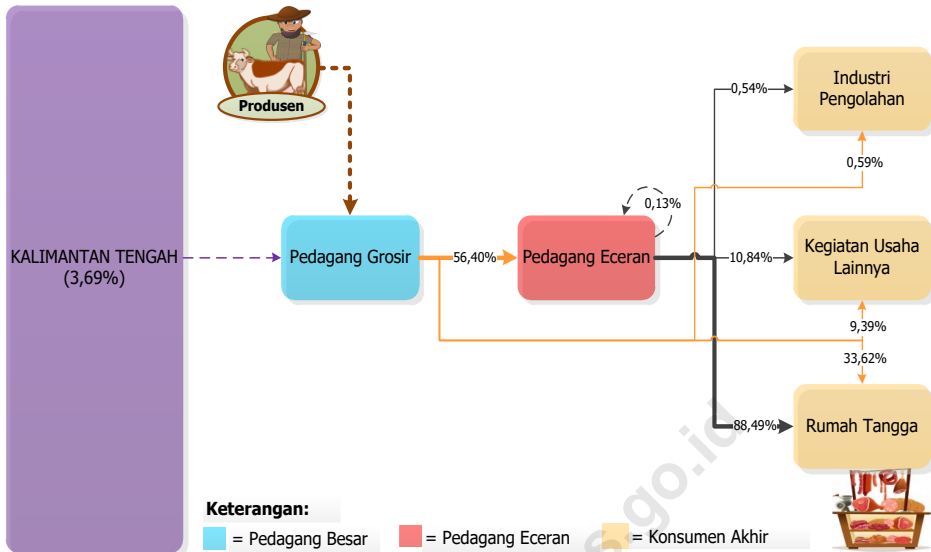
Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

3.21.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran. Berdasarkan Gambar 28, dapat dilihat bahwa pedagang grosir mendapat stok daging sapi dari produsen dan luar provinsi. Pasokan daging sapi yang diterima dari luar provinsi berasal dari Kalimantan Tengah. Oleh pedagang grosir, sebagian besar pasokan tersebut kemudian dijual ke pedagang eceran sebesar 56,40 persen, dan sisanya ke konsumen akhir. Pedagang eceran mendistribusikan stoknya sebagian besar ke rumah tangga sebesar 88,49 persen.

WILAYAH PEMBELIAN
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Barat

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran sebelum akhirnya berujung ke konsumen akhir yaitu kegiatan usaha lainnya.

3.21.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

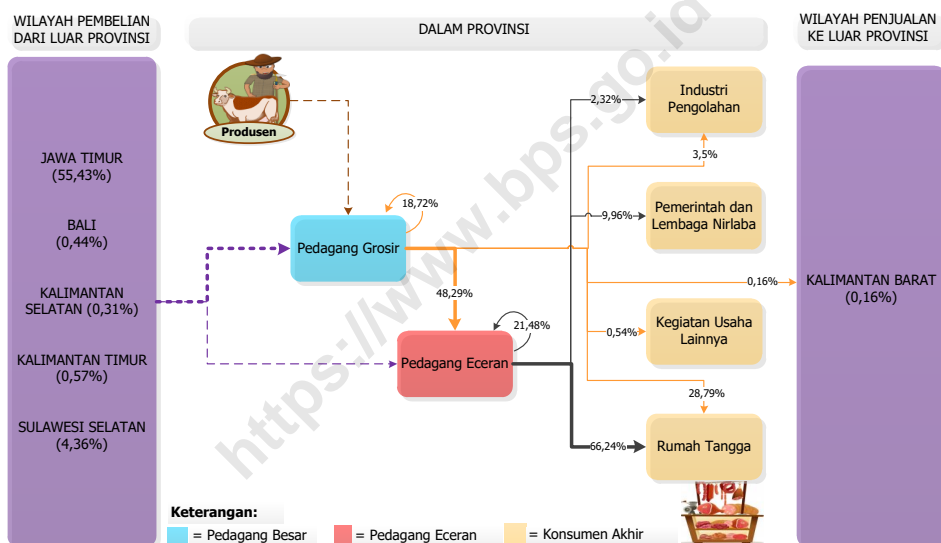
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 36,08 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 36,08 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya.

3.22.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 29. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari Gambar 29 dapat dilihat bahwa secara garis besar ada dua jalur perdagangan yang muncul, yakni jalur yang berawal dari produsen dan jalur yang berawal dari provinsi lain. Untuk jalur provinsi lain, dari data pembelian diperoleh informasi bahwa provinsi tersebut menjual stok daging sapi ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara itu, untuk jalur dari produsen, seluruh produksi daging sapi didistribusikan ke pedagang grosir. Pedagang Grosir menjual sebagian besar stok daging sapi ke pedagang eceran yakni sebesar 48,29 persen, selanjutnya didistribusikan terbesar ke rumah tangga sebesar 66,24 persen.

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituliskan sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang eceran → Konsumen Akhir

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan dua pihak perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Kalimantan tengah bukan merupakan sentra provinsi dimana juga memasok stok daging sapi dari luar provinsi.

3.22.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

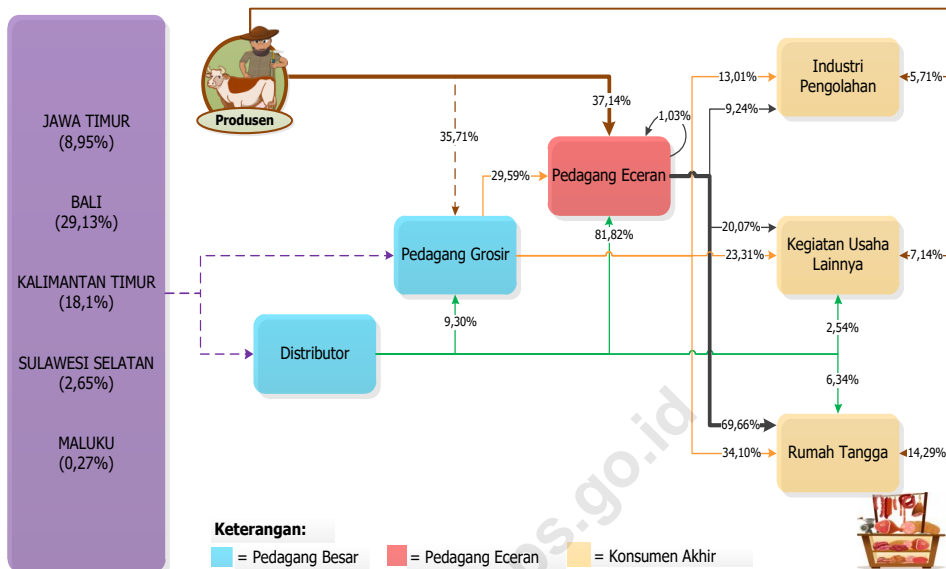
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 47,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 47,02 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

3.23.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan terlihat cukup kompleks. Distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran menjembatani pasokan daging sapi dari produsen dan luar provinsi hingga konsumen. Dari Gambar 30, tampak bahwa produsen memasok terbesar ke pedagang eceran sebesar 37,14 persen. Selain itu, produsen juga memasok ke pedagang grosir sebesar 35,71 persen dan sisanya ke konsumen akhir. Dari luar provinsi, stok daging sapi dipasok oleh distributor dan pedagang grosir. Oleh distributor, mayoritas stok daging sapi dijual ke pedagang eceran, yakni sebesar 81,82 persen. Pedagang eceran menjual stok daging sapi sebagian besar ke rumah tangga, selain itu ke konsumen akhir lainnya dan ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.23.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

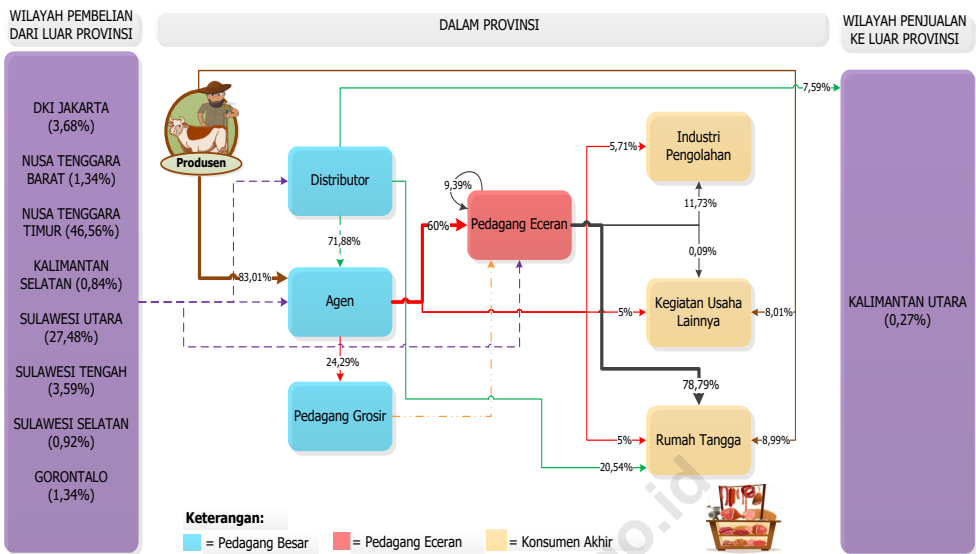
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 6,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 6,80 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

3.24.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur tergolong cukup banyak. Untuk level pedagang besar, pedagang grosir, agen dan distributor yang turut berperan dalam pendistribusian daging sapi di provinsi ini. Dari Gambar 31 tampak bahwa pasokan daging sapi yang beredar, selain bergantung pada hasil produksi dari produsen setempat, juga bergantung pada pasokan dari provinsi lain. Data survei menunjukkan bahwa produsen memiliki kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen akhir yakni kegiatan usaha lainnya (hotel, warung/kedai makan, dll). Sedangkan hasil produksi yang diterima dari provinsi lain diteruskan oleh distributor, agen dan pedagang eceran. Dari data pembelian, produsen juga memasok daging sapi ke agen. Selanjutnya agen sebagian besar mendistribusikan stok daging sapi ke pedagang grosir, sisanya ke konsumen akhir. Selain itu, diketahui bahwa pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan daging sapi ke rumah tangga, sebagian kecil juga dipasarkan ke pedagang eceran lainnya dan konsumen akhir lain. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 31. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Timur

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi adalah sebagai berikut:

Produsen → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan dua pihak perantara, yakni agen dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.24.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

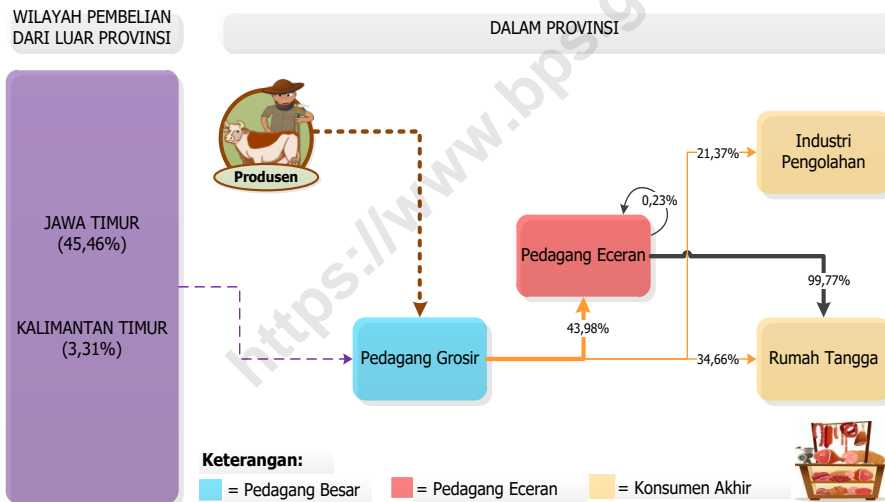
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 49,90 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 49,90 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

3.25.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari data pembelian dapat dilihat bahwa pedagang grosir mendapatkan stok daging sapi melalui produsen dan sebagian besar dari luar Provinsi. Oleh pedagang grosir, sebagian besar pasokan tersebut kemudian dijual ke pedagang eceran, sementara sisanya ke rumah tangga dan industri pengolahan. Di level pedagang eceran didapatkan informasi bahwa pasokan daging sapi hampir seluruhnya dijual ke konsumen akhir yakni rumah tangga dan hanya sebagian kecil dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Kalimantan Utara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Kalimantan Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.25.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

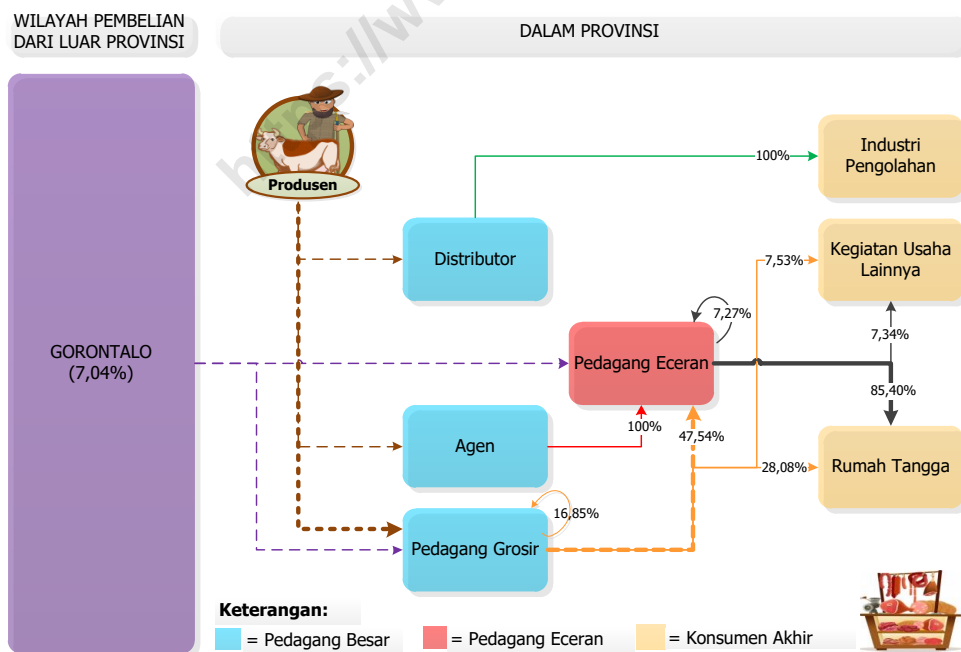
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 38,39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 38,39 persen.

3.26 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

3.26.1 Pola Distribusi

Hasil survei memberikan gambaran bahwa pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa fungsi kelembagaan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran.



Gambar 33. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Utara

Secara umum, pedagang grosir memegang peran vital dalam pendistribusian daging sapi di provinsi ini. Dari Gambar 33 tampak bahwa pasokan daging sapi yang beredar cukup bergantung pada pasokan dari produsen dan luar provinsi melalui pedagang grosir. Selain itu, dari data pembelian menunjukkan bahwa daging sapi yang diterima oleh agen dan distributor sebagian berasal dari produsen, yang kemudian stok agen diterima oleh pedagang eceran sementara distributor ke insutri pengolahan. Pedagang eceran menerima pasokan dari pedagang grosir dan agen yang selanjutnya diteruskan ke konsumen akhir dengan pasokan terbesar ke rumah tangga sebesar 85,40 persen dan sisanya didistribusikan ke kegiatan usaha lainnya.

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran sebagai perantara antara produsen dan konsumen akhir. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.26.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

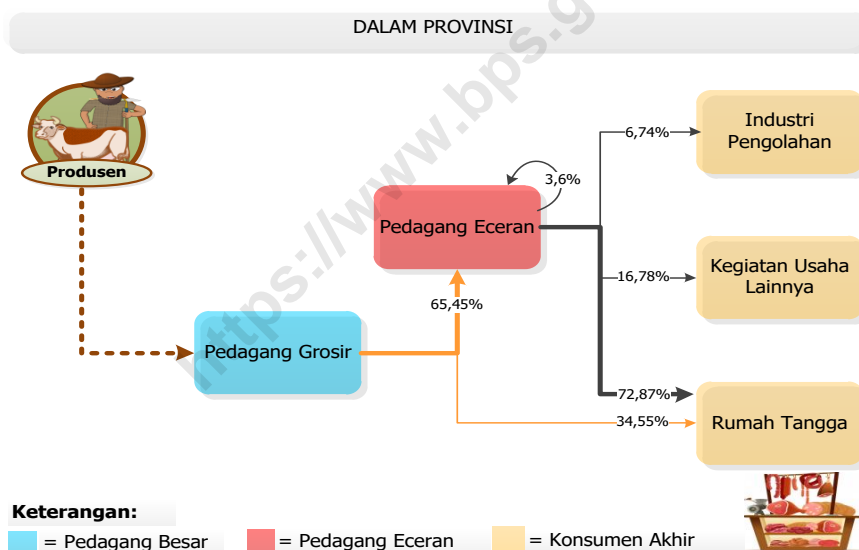
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 23,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 23,12 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

3.27.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Sulawesi Tengah melibatkan beberapa fungsi kelembagaan seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Praktis pola yang terbentuk cukup ringkas. Informasi dari data pembelian menjelaskan bahwa setelah pedagang grosir menerima pasokan dari produsen, pedagang grosir tersebut langsung menyalurkan sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran. Sebagian kecil didistribusikan ke rumah tangga. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar stok daging sapi ke rumah tangga, sisanya ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, warung/kedai makan, dll) dan industri pengolahan. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tengah

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah dari produsen sampai dengan konsumen akhir (rumah tangga) yang terbentuk

melibatkan dua perantara yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.27.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

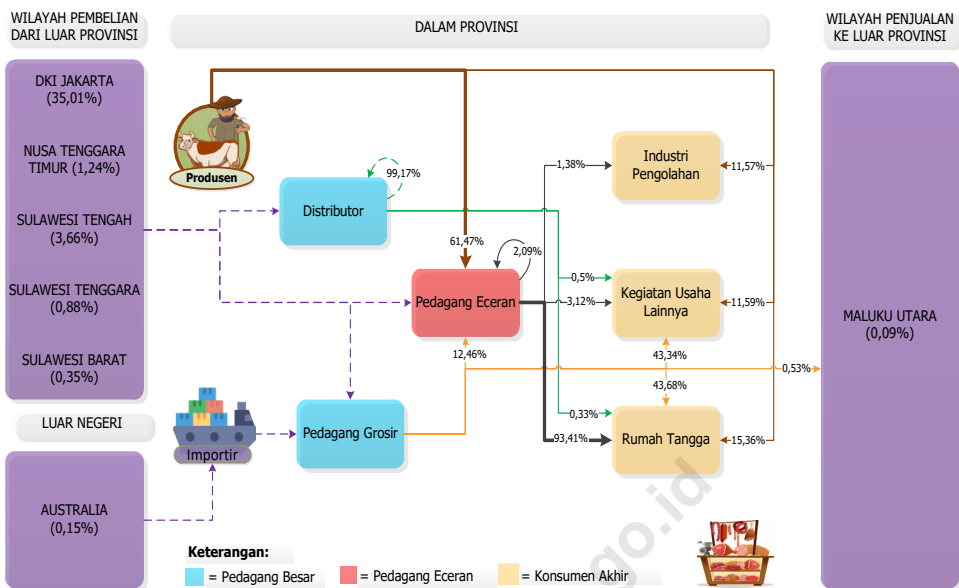
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 40,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 40,26 persen.

3.28 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar dan Kota Parepare dan Kota Palopo.

3.28.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan cukup banyak lembaga usaha perdagangan seperti importir, distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Data survei menggambarkan bahwa pendistribusian daging sapi di provinsi potensial produksi ini lebih didominasi oleh kontribusi dari produsen lokal, walaupun ada sedikit pasokan dari luar provinsi dan luar negeri. Produsen menjual sekitar 61,47 persen pasokannya ke pedagang eceran dan 15,36 persen ke rumah tangga, serta sisanya terbagi habis masing-masing ke industri pengolahan (11,57 persen) dan juga kegiatan usaha lainnya (11,59 persen). Sementara itu, dari data pembelian, didapatkan informasi tambahan bahwa pedagang grosir turut menerima pasokan dari produsen dan luar provinsi, untuk kemudian dipasarkan ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Selain itu, terdapat importir yang mendapat stok dari Australia yang selanjutnya didistribusikan ke pedagang grosir. Di akhir mata rantai distribusi, pedagang eceran menjual mayoritas stok daging sapi ke rumah tangga, yakni sebesar 93,41 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 35. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Selatan

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.28.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 9,40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 9,40 persen.

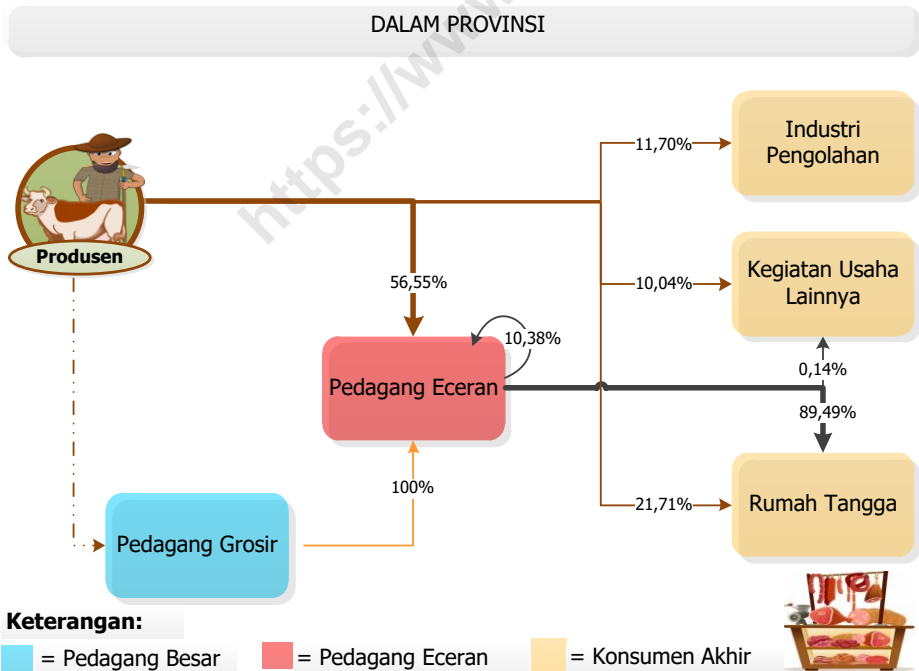
3.29 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten

Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.

3.29.1 Pola Distribusi

Hasil survei menggambarkan bahwa pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong cukup sederhana. Praktis hanya pedagang grosir dan pedagang eceran saja yang terlibat dalam menjembatani suplai daging sapi dari produsen ke konsumen akhir. Dari Gambar 37 tampak pola distribusi dari produsen setempat dalam menyuplai daging sapi, baik ke pedagang maupun ke konsumen akhir. Sementara itu, terdapat informasi tambahan bahwa pedagang grosir yang menerima pasokan dari produsen menjual seluruh daging pasokannya ke pedagang eceran. Di level pengecer, pedagang eceran menjual mayoritas stok daging sapi ke rumah tangga, yakni sebesar 89,49 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terbentuk dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang eceran. Namun, pendistribusian tersebut berpotensi menjadi sedikit lebih panjang ketika melalui jalur : produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – rumah tangga.

3.29.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

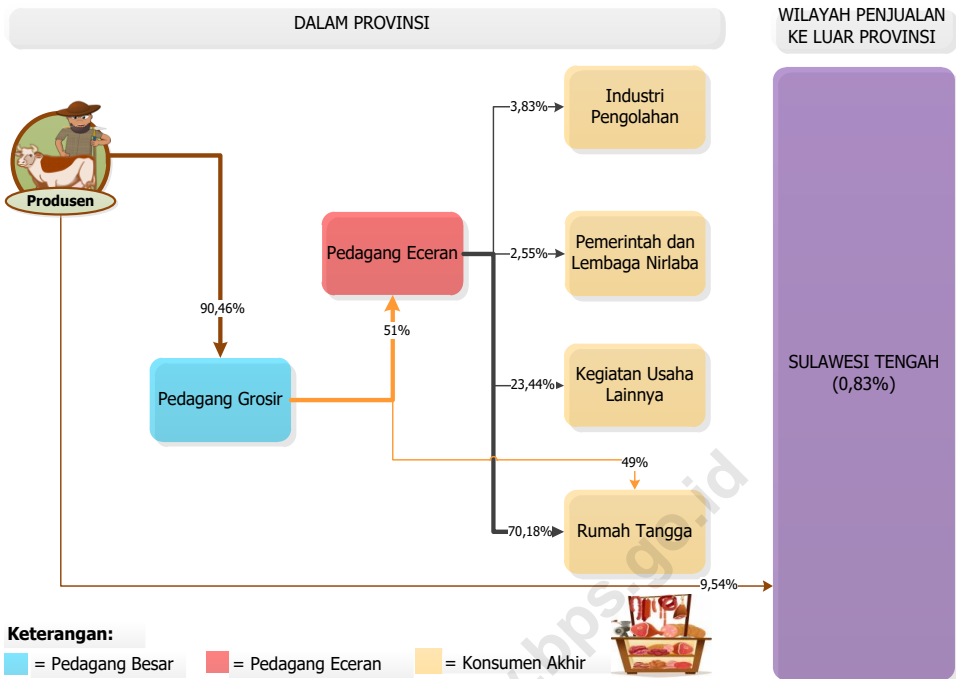
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 13,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 13,72 persen.

3.30 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi meliputi Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

3.30.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Gorontalo melibatkan beberapa fungsi kelembagaan usaha seperti pedagang grosir dan pedagang eceran. Pendistribusian daging sapi berawal dari produsen yang menjual hasil produksinya ke pedagang grosir, dan sisanya ke luar provinsi. Didapatkan informasi bahwa pedagang grosir menerima pasokan daging sapi dari produsen sebesar 90,46 persen. Pedagang grosir menyalurkan pasokan sebagian besar daging sapi ke pedagang eceran, sisanya ke rumah tangga. Pedagang eceran menjual stok daging sapi sebagian besar ke konsumen akhir, yakni rumah tangga sebesar 70,18 persen. Selain itu, pedagang eceran juga menjual stok daging sapi ke industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 37. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Gorontalo

Lebih lanjut, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Gorontalo dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk di Provinsi Gorontalo dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

3.30.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

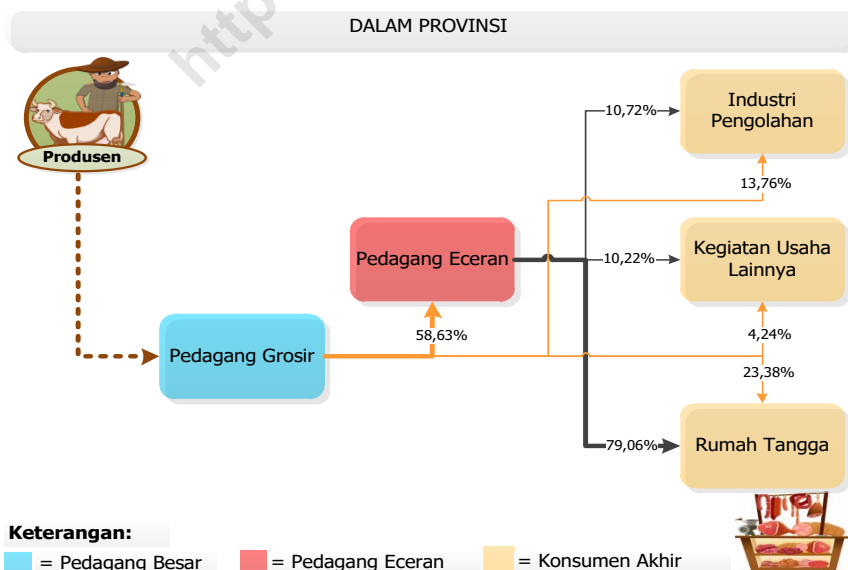
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 50,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 50,29 persen.

3.31 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Pasangkayu.

3.31.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat cukup sederhana dengan melibatkan dua fungsi kelembagaan usaha saja, yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari informasi data pembelian, pedagang grosir mengaku menerima pasokan daging sapi dari produsen. Di level pedagang grosir, sebagian besar pasokan daging sapi didistribusikan untuk memenuhi permintaan dari pedagang eceran, yakni sebesar 58,63 persen. Sebagian kecil lainnya didistribusikan ke rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya. Sedangkan di level pedagang eceran, mayoritas stok yang ada didistribusikan ke rumah tangga sebesar 79,06 persen, dan sisanya ke industri pengolahan serta kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Sulawesi Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Sulawesi Barat dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan dua pihak perantara, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.31.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 31,42 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 31,42 persen.

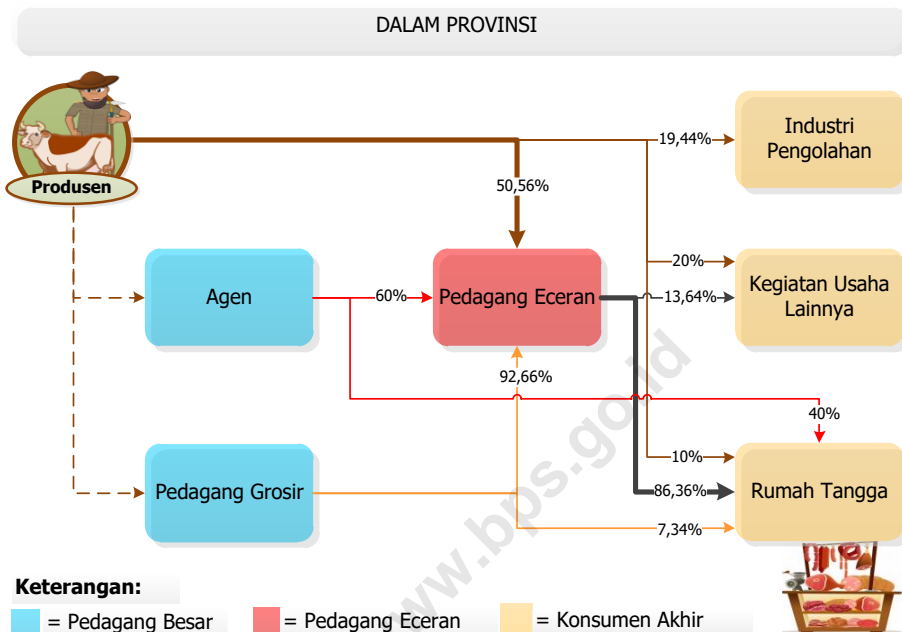
3.32 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kota Ambon, dan Kota Tual.

3.32.1 Pola Distribusi

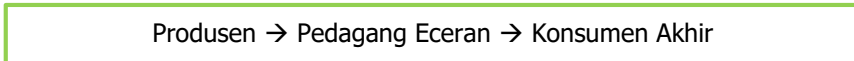
Hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan daging sapi di Provinsi Maluku dimulai dari produsen yang memasok sekitar 50,56 persen hasil produksinya ke pedagang eceran. Selain itu, produsen juga menjual hasil produksinya langsung ke konsumen akhir. Dari data pembelian, didapatkan informasi pendukung bahwa agen dan pedagang grosir juga menerima pasokan dari produsen. Oleh pedagang grosir pasokan tersebut diteruskan ke pedagang eceran sebesar 92,66 persen dan sisanya ke konsumen akhir. Sedangkan agen menjual pasokan daging sapi ke pedagang eceran dan rumah tangga. Lebih lanjut, pada hilir distribusi pedagang eceran yang menerima pasokan dari produsen dan pedagang besar, pengecer menjual sebagian besar pasokan daging sapi ke rumah tangga sebesar 86,36 persen, dan sebagian sisanya ke kegiatan usaha lain. Pola distribusi

perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 39. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku

Dari pola yang terbentuk, pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.32.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

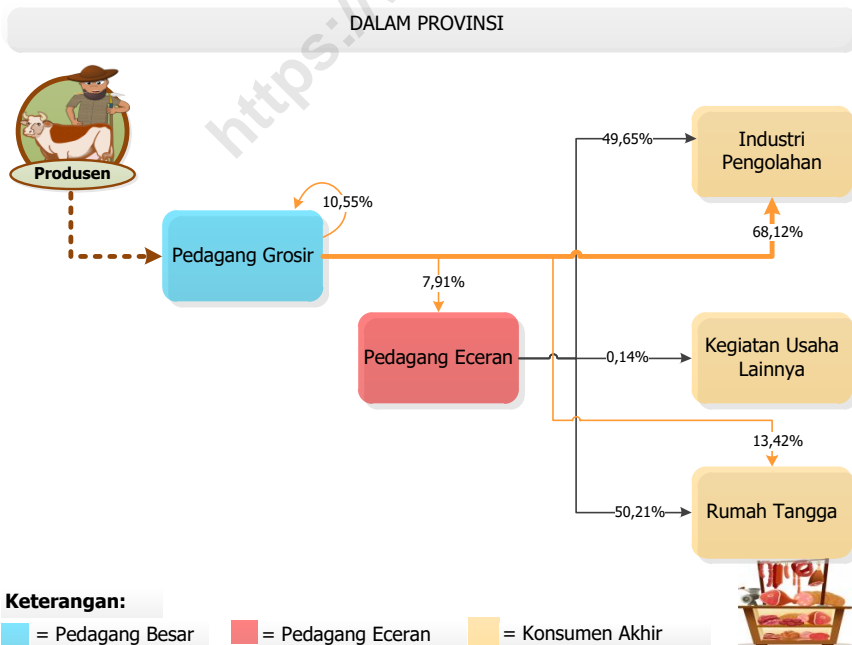
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 17,12 persen.

3.33 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate.

3.33.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, pola distribusi perdagangan daging sapi di provinsi Maluku Utara tergolong cukup sederhana. Praktis hanya pedagang grosir dan pedagang eceran yang terlibat dalam pendistribusian daging sapi dari produsen ke konsumen akhir. Dari data pembelian didapatkan informasi bahwa setelah mendapatkan pasokan daging sapi dari produsen, pedagang grosir hanya menyalurkan sebagian kecil pasokannya ke pedagang eceran dan rumah tangga selaku konsumen akhir. Pasokan dari pedagang grosir cenderung dijual untuk memenuhi kebutuhan dari industri pengolahan. Pasokan dari pedagang eceran mayoritasnya dijual ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada Gambar 40.



Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Maluku Utara

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Maluku Utara dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terbentuk dengan melibatkan satu pihak perantara saja, yakni pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah industri pengolahan.

3.33.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

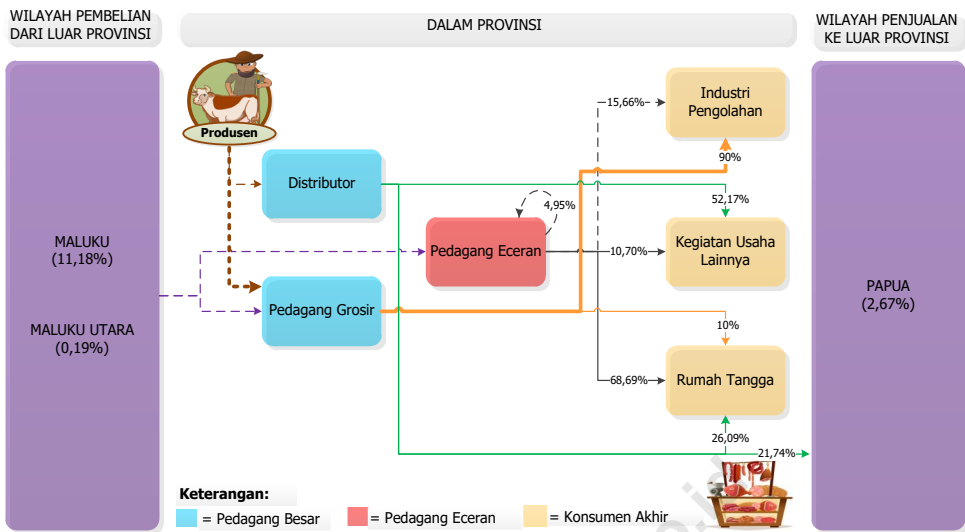
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 21,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 21,15 persen.

3.34 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas daging sapi meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.

3.34.1 Pola Distribusi

Pola distribusi daging sapi di Provinsi Papua Barat melibatkan tiga fungsi lembaga usaha, yaitu produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari informasi data pembelian, pedagang grosir mendapat pasokan daging sapi dari luar provinsi dan produsen. Di level pedagang grosir, sebagian besar pasokan daging sapi didistribusikan ke industri pengolahan sebesar 90 persen, dan sebagian kecil dipasok ke rumah tangga. Sementara, pedagang eceran menerima stok dari luar provinsi yang selanjutnya dijual ke industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Papua Barat menerima pasokan dari luar provinsi yang berasal dari Maluku dan Maluku Utara. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 41. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua Barat

Pola utama distribusi perdagangan daging sapi Provinsi Papua Barat dapat dituliskan sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir terjadi dengan melibatkan satu pihak perantara, yaitu pedagang grosir. Sementara konsumen akhirnya adalah industri pengolahan.

3.34.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

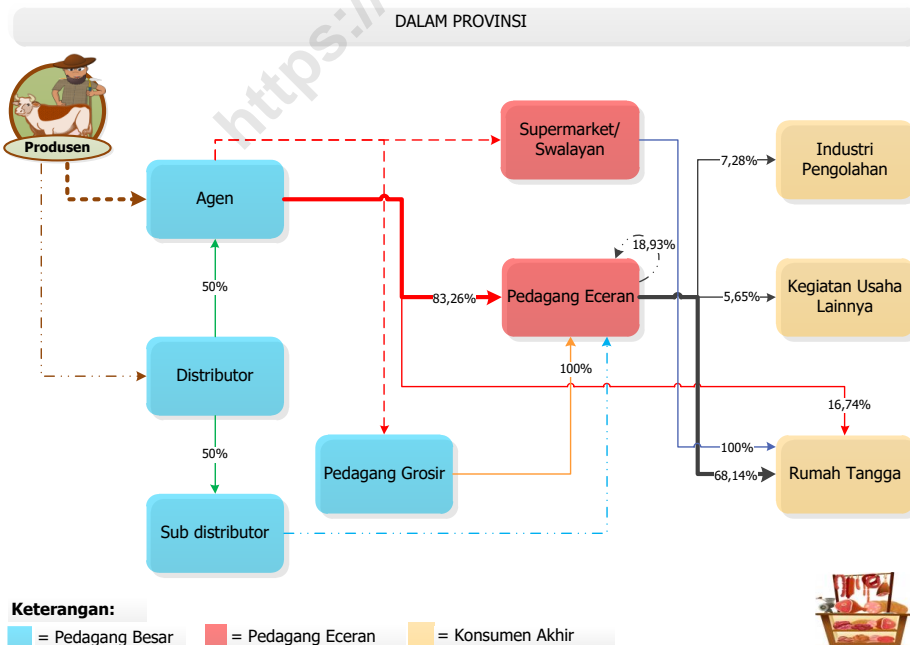
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 11,00 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 11,00 persen.

3.35 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten dan Kota Jayapura.

3.35.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pola distribusi perdagangan di Provinsi Papua melibatkan cukup banyak pelaku usaha. Berawal dari agen yang mendapatkan pasokan daging sapi dari produsen, kemudian menjual sebagian besar daging sapi ke pedagang eceran dan sebagian kecil lainnya ke rumah tangga. Dari data pembelian, diperoleh informasi agen memasok daging sapi ke pedagang grosir dan supermarket/swalayan. Selanjutnya, pedagang eceran menjual sebagian besar pasokan daging sapi ke rumah tangga sebesar 68,14 persen. Selain itu pedagang eceran juga menjual pasokannya ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Disamping itu, distributor yang mendapat pasokan dari produsen turut menyuplai pasokan daging sapi ke agen dan sub distributor. Pola distribusi perdagangan komoditas daging sapi di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada Gambar 42.



Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Daging Sapi di Provinsi Papua

Berdasarkan pola distribusi perdagangan yang terbentuk, pola utama distribusi perdagangan daging sapi adalah sebagai berikut:

Produsen → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan daging sapi yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yaitu agen dan pedagang eceran. Sementara konsumen akhirnya adalah rumah tangga.

3.35.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP daging sapi di Provinsi Papua adalah sebesar 24,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 24,52 persen.

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil Survei Pola Distribusi 2019 menunjukkan bahwa pendistribusian daging sapi dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 1 sampai 3 pelaku usaha distribusi perdagangan. Pola utama pendistribusian daging sapi di Indonesia memiliki dua jalur, yaitu jalur produsen dan jalur importir. Untuk jalur produsen, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: produsen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Begitu pula untuk jalur importir, pola utama distribusi daging sapi memiliki tiga rantai yaitu: luar negeri – importir – pedagang eceran – konsumen akhir. Akan tetapi, jalur produsen dan jalur importir ini berpotensi menjadi lebih panjang ketika melibatkan pedagang besar lainnya di dalam pendistribusiannya.

Jika dilihat per provinsi, pola utama rantai distribusi daging sapi dari 34 provinsi, 18 diantaranya memiliki pola utama distribusi yang hanya melalui dua rantai. Pendistribusian pola utama tersebut melibatkan satu pedagang perantara baik yang berperan sebagai pedagang grosir maupun sebagai pedagang eceran.

Pasokan daging yang diperdagangkan tidak hanya bersumber dari daging sapi domestik. Hasil survei juga menangkap ada pasokan daging yang didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut membuat provinsi-provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan memiliki pola distribusi yang terdapat jalur importir.

Dalam skala nasional, perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total komoditas daging sapi adalah 41,04 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging sapi dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 41,04 persen. Secara spasial, Bengkulu merupakan provinsi dengan perolehan MPP tertinggi yaitu sebesar 65,34 persen. Sementara Riau merupakan provinsi dengan MPP terendah yaitu sebesar 6,53 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, Ening. (2014). *Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta.
- (2017). *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2017, Berdasarkan Hasil Susenas September*. Jakarta.
- (2017). *Statistik Pemotongan Ternak 2017*. Jakarta.
- (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (2015). *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Peternakan Komoditas Daging Sapi*. Jakarta : Pusdatin Sekjen Kementerian Pertanian.
- (2018). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Jakarta : Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Kementrian PPN/Bappenas. *Studi Identifikasi Ketahanan Pangan & Preferensi Konsumen Terhadap Konsumsi Bahan Pangan Pokok Daging*. Jakarta : Direktorat Pangan dan Pertanian.
- Mahbubi, Akhmad. (2014). *Optimasi Pengelolaan Rantai Pasok Daging Sapi dari Nusa Tenggara Timur ke DKI Jakarta*. Jakarta: Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wamaer, Demas dan Kuntoro Boga Andri. (2016). *Tinjauan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi pada Era Otonomi Khusus di Provinsi Papua*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 Edisi Mei.
- Reily, Michael. *Ketergantungan Impor Daging Dituding Penyebab Lemahnya Peternak Lokal*. Dikutip dari <https://katadata.co.id>, pada 23 Oktober 2019.

Tribunnews. *Harga Daging Sapi di Atas HET, PJs Bupati Belitung Terus Tinjau Lapangan Agar Stabil.* Dikutip dari <https://bangka.tribunnews.com/2018/06/07/harga-daging-sapi-diatas-het-pjs-bupati-belitung-akan-terus-tinjau-lapangan-agar-stabil>, pada 28 November 2019.

Uly, Yohana Artha. *Ini Biang Keladi Harga Daging Sapi Tembus Rp. 140.000/Kg.* Dikutip dari <https://economy.okezone.com/read/2018/06/17/320/1911050/ini-biang-keladi-harga-daging-sapi-tembus-rp140-000-kg>, pada 27 November 2019.

Antara. *Harga Daging Sapifi Bandar Lampung Bertahan RP. 110.000 – Rp. 120.000/Kg.* Dikutip dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20180829/534/832855/harga-daging-sapi-di-bandar-lampung-bertahan-10.000rp-120.000kg>, dikutip pada 27 November 2019.

Ardiyanto. *Harga Daging Bengkulu termahal Kelima di Indonesia.* Dikutip dari <https://pedomanbengkulu.com/2018/04/harga-daging-bengkulu-termahal-kelima-di-indonesia/>, pada 2 Desember 2019.

Kementrian Pertanian. *Perkembangan Rata-Rata Harga Eceran Beberapa Komoditas di Tingkat Nasional.* Dikutip dari http://aplikasi2.pertanian.go.id/simharga2017/konsumen_kota/hkp4, pada 2 Desember 2019.

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

RAHASIA



VPDP-19

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
TAHUN 2019**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSPU)

BLOK I: KETERANGAN USAHA					
(1)	(2)				
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
2. Kabupaten/Kota ¹⁾ :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
4. Kelurahan/Desa ¹⁾ :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :					
7. Alamat Perusahaan/Usaha :					
Kode pos :	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
Nomor Telepon : (.....)	Ext: Nomor Fax:				
E-mail:	Website:				

1) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Kerahaslaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahaslaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.

Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-6, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3610291-4, 3641195, 3642506 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 366 3615. Email : statpdrn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK II: KETERANGAN UMUM																														
(1)	(2)																													
<p>1. Kegiatan utama usaha/perusahaan tahun 2018:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Komoditas yang diteliti:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. Beras Medium</td> <td style="width: 25%;">3. Bawang Merah</td> <td style="width: 25%;">5. Daging Ayam Ras</td> <td style="width: 25%;">7. Gula Pasir</td> </tr> <tr> <td>2. Cabai Merah</td> <td>4. Daging Sapi</td> <td>6. Telur Ayam Ras</td> <td>8. Minyak Goreng</td> </tr> </table> <p>3. Fungsi Pelaku Usaha:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. Produsen</td> <td style="width: 25%;">4. Sub distributor</td> <td style="width: 25%;">7. Pedagang eceran</td> <td style="width: 25%;">10. Importir</td> </tr> <tr> <td>2. Pedagang pengepul</td> <td>5. Agen</td> <td>8. Supermarket/Swalayan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Distributor</td> <td>6. Pedagang grosir</td> <td>9. Eksportir</td> <td></td> </tr> </table> <p>4. Badan Usaha:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">1. PT</td> <td style="width: 25%;">2. CV</td> <td style="width: 25%;">3. Koperasi</td> <td style="width: 25%;">4. Ijin Khusus</td> <td style="width: 25%;">5. Tidak Berbadan Usaha</td> </tr> </table>	1. Beras Medium	3. Bawang Merah	5. Daging Ayam Ras	7. Gula Pasir	2. Cabai Merah	4. Daging Sapi	6. Telur Ayam Ras	8. Minyak Goreng	1. Produsen	4. Sub distributor	7. Pedagang eceran	10. Importir	2. Pedagang pengepul	5. Agen	8. Supermarket/Swalayan		3. Distributor	6. Pedagang grosir	9. Eksportir		1. PT	2. CV	3. Koperasi	4. Ijin Khusus	5. Tidak Berbadan Usaha	<p>KBLI 2015</p> <table style="width: 100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25px; height: 20px;"> </td> </tr> </table> <p>ditisi oleh pemeriksa</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><input type="checkbox"/></p>				
1. Beras Medium	3. Bawang Merah	5. Daging Ayam Ras	7. Gula Pasir																											
2. Cabai Merah	4. Daging Sapi	6. Telur Ayam Ras	8. Minyak Goreng																											
1. Produsen	4. Sub distributor	7. Pedagang eceran	10. Importir																											
2. Pedagang pengepul	5. Agen	8. Supermarket/Swalayan																												
3. Distributor	6. Pedagang grosir	9. Eksportir																												
1. PT	2. CV	3. Koperasi	4. Ijin Khusus	5. Tidak Berbadan Usaha																										

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PEMBELIAN)												
1. Pembelian barang dagangan:												
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								
1.	Dalam provinsi											
	a. Importir	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	b. Produsen/Petani/Peternak	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	c. Distributor	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	d. Sub distributor	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	e. Agen	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	f. Pedagang grosir	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	g. Pedagang pengepul	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	h. Pedagang eceran	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
2.	Luar provinsi	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
3.	Luar negeri	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
	Jumlah	<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %										
2. Wilayah pembelian barang dagangan:												
No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Beli per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Beli per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
a.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
b.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
c.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
d.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
e.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
f.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
g.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
h.		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %						
	Jumlah		<table style="width: 40px; border: 1px solid black;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> %									

³⁾ Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)

1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.	Dalam provinsi						
a.	Eksportir	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
b.	Distributor	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
c.	Sub distributor	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
d.	Agen	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
e.	Pedagang grosir	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
f.	Pedagang pengepul	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
g.	Supermarket/swalayan	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
h.	Pedagang eceran	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
i.	Industri pengolahan	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
j.	Kegiatan usaha lainnya	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
l.	Rumah tangga	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
2.	Luar provinsi	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
3.	Luar negeri	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %					
	Jumlah	1 0 0 %					

2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:

No.	Provinsi/Negara	Kode ³⁾	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
a.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
b.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
c.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
d.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
e.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
f.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
g.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
h.		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> %						
	Jumlah		1 0 0 %										

³⁾ Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa

BLOK V: NERACA PERDAGANGAN

1. Pembelian dan penjualan barang dagangan/hasil produksi selama tahun 2018:

Uraian	Volume	Satuan ¹⁾	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Stok Awal (sisa 2017)	kg / kw / ton
b. Pembelian barang dagangan / Produksi ¹⁾	kg / kw / ton
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain	kg / kw / ton
d. Hilang/husak	kg / kw / ton
e. Penjualan	kg / kw / ton
f. Stok Akhir (sisa 2018)	kg / kw / ton

¹⁾ Conel yang tidak sesuai

2. Berapa total nilai penjualan (Rp) semua barang yang diperdagangkan selama tahun 2018?

3. a. Selama tahun 2018 rata-rata harga komoditas yang diproduksi/dijual dibanding tahun sebelumnya

Lebih murah 1 → ke R3b Lebih mahal 2 → ke R3c Sama saja 3 → ke Blok VI

b. Jika lebih murah, faktor utama penyebabnya:

Produksi banyak 1 Ada operasi pasar 3
 Ada Impor 2 Lainnya (tuliskan :) 4

c. Jika lebih mahal, faktor utama penyebabnya:

Produksi kurang 1 Faktor cuaca 3
 Tidak ada Impor/operasi pasar 2 Lainnya (tuliskan :) 4

BLOK VI: CATATAN

<https://www.lms.go.id>

BLOK VII: KETERANGAN PETUGAS DAN PEMBERI JAWABAN

URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA	PEMBERI JAWABAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Nama
2. Telepon
3. Tanggal	s.d	s.d	s.d
4. Tanda tangan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

E-mail: bpsdq@bps.go.id

Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-317-6



9 786024 383176